

**PENGARUH UMUR, PENDIDIKAN, PENDAPATAN  
DAN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA  
TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN PENCURIAN  
DENGAN PENDEKATAN EKONOMI**

**( Studi Kasus: Narapidana Di LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang )**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**TRESNA MAULANA**  
**NIM. C2B008071**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**

**2014**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Tresna Maulana

Nomor Induk Mahasiswa : C2B008071

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH UMUR, PENDIDIKAN,  
PENDAPATAN DAN JUMLAH  
TANGGUNGAN KELUARGA  
TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN  
PENCURIAN DENGAN PENDEKATAN  
EKONOMI (Studi Kasus: Narapidana di  
LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang)**

Dosen Pembimbing : Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si

Semarang, Juli 2014

Dosen Pembimbing

( Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si )

NIP. 197508212002122001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Tresna Maulana

Nomor Induk Mahasiswa : C2B008071

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis /IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH UMUR, PENDIDIKAN, PENDAPATAN DAN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PENDEKATAN EKONOMI (Studi Kasus: Narapidana di LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal : 16 Juni 2014

Tim Penguji:

1. Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si (.....)
2. Drs. H. Edy Yusuf Agung G, MSc. Ph.D (.....)
3. Darwanto, S.E M.Si (.....)

Semarang, Juli 2014

Pembantu Dekan I,

(Anis Chariri, S.E, M.Com, Ph.D, Akt)

NIP. 19670809 199203 1001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Tresna Maulana, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “PENGARUH UMUR, PENDIDIKAN, PENDAPATAN DAN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PENDEKATAN EKONOMI (Studi Kasus: Narapidana di LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang)” adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah - olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Juli 2014  
Yang membuat pernyataan,

**(Tresna Maulana)**  
NIM. C2B 008 071

## ABSTRACT

*The Theft is one of crimes that are really worrying people, this kind of crime is commonly related with an economic problems, such as : productive ages, low rate of education, low income, and number of dependents family. Semarang as a capital city of Central Java is claimed to be the highest rate of crimes among cities in Central Java. And one of the most significant crime is theft.*

*The purpose of this research is to analyze influence age, education, income and the number of dependents family on the crime of burglary in the City of Semarang ( case study: in lp classes 1 Kedungpane city semarang ). The object of the research is the prisoners affected by crimes and burglary in LP Class 1 Kedungpane Semarang. The types of data used in this research is primary data and secondary data*

*The method of data analysis used in this research is multiple regression analysis with double – log model. The multiple regression analysis result from shows that from four independent variables, such as age, education, income and number of dependents family, only the age variable which is not signifcant. Education variable is significant and it had a negative impact, income variable have negative effects and significant, the number of dependents family have positive relations and significant, while age variable had a negative effect and does not significant.*

**Keywords** : *Theft, Age, Education, Income, Family Dependency, LP Klas 1 Kedungpane, Semarang.*

## ABSTRAKSI

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, seseorang yang melakukan tindakan kejahatan pencurian pada umumnya terkait dengan masalah ekonomi, yaitu: usia produktif, rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan yang relatif rendah dan jumlah tanggungan keluarga. Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah tingkat kejahatan paling tinggi diantara Kota/Kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Jawa Tengah, dan salah satu kejahatan yang paling menonjol adalah kejahatan pencurian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh umur, pendidikan, pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang (studi kasus: di LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang). Obyek penelitian ini adalah para narapidana yang terkena kasus kejahatan pencurian di LP Klas 1 kedungpane Kota Semarang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan model *double – log*. Hasil dari analisis regresi berganda menunjukkan bahwa dari empat variabel independen, yaitu umur, pendidikan, pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga, hanya variabel umur yang tidak signifikan. Variabel pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, variabel pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan, variabel jumlah tanggungan mempunyai hubungan positif dan signifikan sedangkan variabel umur berpengaruh negatif tidak signifikan.

**Kata Kunci :** Kejahatan Pencurian, umur, pendidikan, pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga, LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“ Jika engkau memohon, memohonlah kepada Allah.  
Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah  
kepada Allah ”*

*(HR. Tirmidzi)*

*“ Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang, apabila  
orang itu tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri ”*

*(Hari Kardjono)*

*“ Pendidikan adalah mata uang yang berlaku diseluruh  
penjuru dunia ”*

*(Narji Cagur)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk keluargaku tercinta, yang telah memberikan segala perhatiannya dan kasih sayangnya kepada penulis, serta untuk kawan – kawanku yang selalu ada saat suka maupun duka.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur dan terima kasih selalu penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penullis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh umur, pendidikan, pendapatan, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga terhadap tingkat kejahatan pencurian dengan pendekatan ekonomi (Studi Kasus: Narapidana di LP klas 1 kedungpane Kota Semarang)”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Sebelumnya, tidak lupa penulis menyampaikan ucapan maaf yang sedalam-dalamnya jika terdapat kesalahan selama proses penelitian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Melalui tulisan yang sederhana ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang ditujukan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Hadi Sasana, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing serta memberi masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.



4. Ibu Nenek Woyanti, S.E, M.Si, selaku dosen wali atas segala arahan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan.
6. Abah dan mamah (Abdul Rozak dan Latifah) dan keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis dari awal pembuatan skripsi hingga selesai.
7. Bapak Drs. Supratiknyo, MH, selaku Kepala kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENHUMHAM) Provinsi Jawa Tengah. Bapak Daru, selaku pembina narapidana di LP Kedungpane Kota Semarang yang telah membantu penulis dalam perijinan dan berbagi pengalaman, serta Staff di LP Kedungpane Kota Semarang. Karyawan perpustakaan BPS Jawa Tengah yang turut membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Yudho Dito Arsono, Muhammad Haris Hidayat dan Arief Rachman terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan dari semester satu hingga sakarang. Semoga mimpi kita menjadi kenyataan.
9. Sahabat – sahabatku di IESP 2008, Haryo, Tedy, Cahyo, Azhar, Bayu Setyoko, Bayu Prasetyo, Rahadian, Fendi, Ardana, Asep, Indra, wahyu, Sholeh, Mahoca, Dicky, Galuh, Rian, Dika, Nailul, Cahya Purwanggono, Anang, Riza, Syamsudin, Tezar, Tian, Eko, Silvi,

Fanita, Arum, Diah, Marita, Ayola,lin, Niken, serta seluruh teman – teman IESP 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaannya selama kuliah ini, kalian adalah para sahabat terhebat yang pernah penulis miliki. Kalian luar biasa.

10. Sahabat – sahabat penghuni kos, Pradana, Iqbal, Ade, Imam, Bagus, Firman, Izul, Bagus Aji, Pangki, Pimo, serta teman – teman kos yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan motivasi yang kalian berikan pada penulis. Kalian hebat.

11. Sahabat – sahabat alumni IESP, Mas Reza, Mas Arif, Mba Selly, Mba Manda. Terimakasih buat motivasinya.

12. Sahabat – sahabat IESP 2007 dan IESP 2009, Akhrom, Abi, Hafid, Indra, Angga, Putri, Novita Dinar dan Nur Widi Astuti, Erlinda Puspita Sari. Terimakasih atas bantuan dan motivasi yang kalian beri kepada penulis.

13. Teman – teman SMA, Agustian Andri Wibowo, Budi Setiawan, Wawan, Fadli, Irfan,Abed Nego, Arya Pradipta, Terimakasih atas kebersamaannya selama hidup diperantauan, suka dan duka kita jalani bersama.

14. Sahabat – sahabat KKN Desa Kadirejo, Aziz, Ni Putu Diah, Ika, Ita, Ipeh, Oka dan Arya Amanza. Terimakasih atas doa dan motivasi yang kalian berikan pada penulis.

15. Sahabat- sahabat yang berada di kampung halaman, Wahyu, Lutfi, Faesol, Ramdhoni, Teguh, serta yang lain yang tidak bisa disebutkan

satu persatu. Terimakasih atas doa dan motivasi yang kalian berikan pada penulis.

16. Sahabat – sahabat dikomunitas pecinta reptil (KORAL), David, Sakti, Dea, Priyo, Fauzan, Rifdi, Putra, Mas Bandoro, Lary, Adam dan yang lainnya. Terimakasih atas doa dan motivasi yang kalian berikan. Kalian hebat.

17. Semua responden yang telah membantu penulis dalam pengisian kuesioner di LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang.

18. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis berharap semoga kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik berikutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Juli 2014

Penulis

Tresna Maulana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
1.1     Latar Belakang Masalah.....	1
1.2     Rumusan Masalah .....	16
1.3     Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
1.3.1     Tujuan Penelitian.....	19
1.3.2     Kegunaan Penelitian .....	19
1.4     Sistematika Penulisan.....	20
BAB II     TELAAH PUSTAKA .....	22
2.1     Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	22
2.1.1     Definisi Kejahatan .....	22
2.1.2     Kejahatan Pencurian .....	23
2.1.3     Biaya dan Kejahatan.....	24
2.1.3.1     Biaya Korban dan Kejahatan .....	25
2.1.3.2     Biaya Potensial Korban.....	25
2.1.3.3     Biaya Pelaku Kejahatan .....	26
2.1.3.4     Biaya Publik .....	27
2.1.4     Pendekatan Rasional Ekonomi untuk Analisis Kejahatan.....	28
2.1.4.1     Tingkat Keseimbangan Kejahatan .....	33
2.1.4.1.1     Penawaran Pelanggaran .....	37
2.1.4.2     Pengaruh Umur Terhadap Tingkat Kejahatan.....	38

2.1.4.3	Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kejahatan.....	40
2.1.4.4	Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Kejahatan.....	42
2.1.4.5	Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Tingkat Kejahatan.....	43
2.2	Penelitian Terdahulu .....	43
2.3	Kerangka Pemikiran .....	50
2.4	Hipotesis.....	53
BAB III	METODE PENELITIAN .....	54
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	54
3.1.1	Variabel Penelitian .....	54
3.1.2	Definisi Operasional variabel .....	54
3.2	Populasi dan Sampel .....	56
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	56
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	57
3.5	Metode Analisis.....	58
3.6	Pendeteksian Asumsi Klasik .....	60
3.6.1	Deteksi Multikolinearitas .....	60
3.6.2	Deteksi Heterokedastisitas.....	62
3.6.3	Deteksi Normalitas .....	63
3.6.4	Deteksi Autokolerasi .....	64
3.7	Pengujian Hipotesis.....	65
3.7.1	Uji Goodnes Of Fit (Koefisien Determinasi/ $R^2$ ) .....	65
3.7.2	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .....	67
3.7.3	Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	69
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS .....	71
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	71
4.1.1	Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang.....	71
4.1.1.1	Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang.....	71
4.1.1.2	Letak Geografis .....	72
4.1.1.3	Fasilitas ( Sarana dan Prasarana ).....	72

4.1.1.4	Jenis – Jenis Pembinaan .....	73
4.1.1.5	Struktur Organisasi .....	76
4.2	Karakteristik Responden .....	78
4.2.1	Karakteristik Responden Menurut Jumlah Kasus yang Pernah Dilakukan .....	78
4.2.2	Karakteristik Responden Menurut Umur .....	79
4.2.3	Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan .....	79
4.2.4	Karakteristik Responden Menurut Pendapatan .....	80
4.2.5	Karakteristik Responden Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga .....	81
4.2.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pencurian dan Pendidikan .....	81
4.2.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pencurian dan Umur .....	82
4.2.8	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pencurian dan Pendapatan .....	83
4.2.9	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pencurian dan Jumlah Tanggungan Keluarga .....	83
4.2.10	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pencurian dan Motif .....	84
4.3	Analisis Data .....	85
4.3.1	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik .....	86
4.3.1.1	Deteksi Multikolinearitas .....	86
4.3.1.2	Deteksi Autokorelasi .....	87
4.3.1.3	Deteksi Heteroskedastisitas .....	88
4.3.1.4	Deteksi Normalitas .....	89
4.3.2	Pengujian Statistik ( <i>Goodness of Fit</i> ) .....	90
4.3.2.1	Koefisien Determinasi .....	90
4.3.2.2	Uji Signifikan Simultan (Uji-F) .....	91
4.3.2.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t) .....	93
4.4	Interpretasi Hasil .....	95
BAB V	PENUTUP .....	99
5.1	Kesimpulan .....	99

5.2	Keterbatasan .....	100
5.3	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA .....		103
LAMPIRAN .....		106

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012.....	4
Tabel 1.2	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten /Kota Tahun 2010 – 2012.....	6
Tabel 1.3	Pertumbuhan Upah Minimum Kabupaten / Kota8Menurut . Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012.....	8
Tabel 1.4	Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2012.....	9
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2012.....	10
Tabel 1.6	Pola Pelaku Kejahatan Berdasarkan Umur di Kota Semarang Tahun 2010 – 2012.....	11
Tabel 1.7	Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Indeks Gini di Kota Semarang Tahun 2010 – 2012.....	12
Tabel 1.8	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kota di Provinsi jawa Tengah Tahun 2010 – 2012.....	13
Tabel 1.9	Pola Aspek Kejahatan Berdasarkan Motif di Kota Semarang Tahun 2010 – 2012.....	13
Tabel 1.10	Kejahatan yang Meresahkan Masyarakat Kota Semarang Per Kasus Tahun 2010 – 2012.....	15
Tabel 1.11	Jumlah Personil Polisi di Kota Semarang Tahun 2010 – 2012.....	16
Tabel 2.1	Ekspektasi Utilitas Kejahatan .....	30
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	44
Tabel 4.1	Jumlah Responden Menurut Banyaknya Kasus yang Dilakukan .....	78
Tabel 4.2	Jumlah Responden Menurut Umur .....	79
Tabel 4.3	Jumlah Responden Menurut Pendidikan.....	80
Tabel 4.4	Jumlah Responden Menurut Pendapatan .....	80
Tabel 4.5	Jumlah Responden Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga .....	81
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pencurian dan Pendidikan.....	81



Tabel 4.7	Karakteristik responden Berdasarkan Tingkat Pencurian dan Umur.	82
Tabel 4.8	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pencurian dan Pendapatan .....	83
Tabel 4.9	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pencurian dan Jumlah Tanggungan Keluarga .....	84
Tabel 4.10	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pencurian dan Motif.....	84
Tabel 4.11	Deteksi Multikolinearitas .....	87
Tabel 4.12	Deteksi Heteroskedastisitas .....	89
Tabel 4.13	Deteksi Normalitas dengan Uji Kolmogorov – Smirnov .....	90
Tabel 4.14	Uji Koefisien Determinasi .....	91
Tabel 4.15	Uji F .....	92
Tabel 4.16	Uji t .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ekspektasi Utilitas Kejahatan.....	29
Gambar 2.2	Permintaan dan Penawaran Kejahatan .....	34
Gambar 2.3	Keseimbangan Kejahatan .....	36
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran .....	52
Gambar 3.1	Uji Durbin-Watson .....	65
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	77
Gambar 4.2	Hasil Deteksi Autokolerasi dengan Durbin-Watson Test .....	88

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN A SURAT IJIN PENELITIAN .....	106
LAMPIRAN B KUESIONER .....	107
LAMPIRAN C DATA MENTAH RESPONDEN .....	112
LAMPIRAN D OUTPUT REGRESI LINEAR BERGANDA.....	115

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang *hyper* kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan menghadapi adaptasi *adjustment* menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri. Hal tersebut mendorong orang untuk mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan berbuat semau sendiri demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain (Uswatun, 2008).

Masyarakat modern yang tingkat ekonominya menengah ke atas sering menumbuhkan aspirasi – aspirasi materiil tinggi, dan sering disertai oleh ambisi – ambisi yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang – barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan yang wajar, mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan kata lain bisa dinyatakan terdapat diskrepansi (ketidak sesuaian, pertentangan) antara ambisi – ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong untuk melakukan tindakan kriminal atau jika terdapat diskrepansi antara aspirasi – aspirasi dengan potensi – potensi personal, maka akan terjadi “*maladjustment*”

ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomi), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana (Uswatun, 2008).

Menurut Kartini Kartono (1992) dalam Hardianto (2009), secara yuridis – formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku manusia yang bertentangan dengan moral manusia, merugikan masyarakat, asosial sifatnya, dan melanggar hukum serta undang – undang pidana. Sedangkan secara umum sosiologi kejahatan adalah semua bentuk ucapan , perbuatan , dan tingkah laku secara ekonomis, politik, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma – norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Secara umum kelompok kejahatan dibagi menjadi empat, (1) kelompok kejahatan terhadap hak milik seperti perampokan, pencurian, pembegalan, pembakaran yang disengaja, dan penggelapan; (2) kelompok kejahatan terhadap hak pribadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan; (3) kelompok perilaku negatif menurut pandangan masyarakat seperti perjudian, pelacuran, dan narkoba; (4) kelompok pelanggaran seperti kerusuhan dan pelanggaran lalu-lintas.

Menurut Destiyani (2011) faktor penyebab terjadinya tindak kriminal adalah minimnya ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak memadai, sehingga orang tersebut akan melakukan tindakan yang bodoh yang menjurus ke arah kriminal. Banyak sudut pandang yang digunakan untuk memberikan penjelasan fenomena tindak kriminalitas yang ada. Menurut penelitian Destiyani (2011) yang melihat dari sudut pandang psikologi menjelaskan bahwa, faktor

kejiwaan atau tekanan seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak kriminal, dalam kejiwaan seseorang sangat erat kaitannya untuk melakukan suatu tindakan.

Kasus kejahatan yang terjadi pada masyarakat saat ini sangat beraneka ragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, kebakaran, pemerkosaan, pemerasan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan perjudian.

Kasus Kejahatan di Provinsi Jawa Tengah sangat memprihatinkan, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2010 – 2012 cenderung mengalami peningkatan, dari 19.645 kasus di tahun 2010 naik menjadi 20.746 kasus di tahun 2012. Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan Kota yang paling banyak menyumbang jumlah tindak kejahatan selama tiga tahun terakhir ini. Meskipun pada tahun 2012 jumlah kejahatan yang dilaporkan di Kota Semarang mengalami penurunan dari 4.252 kasus menjadi 3.947 kasus, akan tetapi tidak merubah posisi Kota Semarang dengan jumlah kejahatan yang paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2012, hal ini bisa dilihat pada Tabel 1.1.

Masalah Kejahatan yang semakin pelik terjadi pada seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang tanpa terkecuali. Lingkungan masyarakat yang beragam sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan. Lingkungan Kota besar yang padat dan sibuk dengan berbagai aktifitas memudahkan terjadinya suatu tindak kejahatan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan menurut**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012**

No	Kabupaten / Kota	2010		2011		2012	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1	Kab. Cilacap	517	426	710	483	715	443
2	Kab. Banyumas	317	273	398	349	480	418
3	Kab. Purbalingga	308	232	452	364	424	304
4	Kab. Banjarnegara	377	234	225	187	198	148
5	Kab. Kebumen	396	283	333	270	385	298
6	Kab. Purworejo	371	253	417	334	396	318
7	Kab. Wonosobo	378	287	294	218	321	224
8	Kab. Magelang	479	335	430	336	410	218
9	Kab. Boyolali	379	254	327	236	406	296
10	Kab. Klaten	816	640	924	778	868	740
11	Kab. Sukoharjo	544	428	621	507	473	396
12	Kab. Wonogiri	231	168	174	165	227	189
13	Kab. Karanganyar	409	318	317	270	429	320
14	Kab. Sragen	921	484	918	541	723	402
15	Kab. Grobogan	329	280	672	617	265	198
16	Kab. Blora	349	286	330	285	255	219
17	Kab. Rembang	317	244	391	315	368	289
18	Kab. Pati	923	481	1.018	502	633	394
19	Kab. Kudus	603	371	709	336	573	343
20	Kab. Jepara	829	590	671	523	528	440
21	Kab. Demak	570	337	571	398	1.587	664
22	Kab. Semarang	527	444	598	489	570	386
23	Kab. Temanggung	398	295	442	316	365	271
24	Kab. Kendal	405	310	352	261	273	193
25	Kab. Batang	198	170	299	288	405	281
26	Kab. Pekalongan	289	189	329	242	384	260
27	Kab. Pemalang	235	224	373	332	332	292
28	Kab. Tegal	265	198	212	172	232	168
29	Kab. Brebes	330	259	360	347	216	153
30	Kota Magelang	184	110	216	138	190	137
31	Kota Surakarta	1.738	1.144	1.873	1.207	1.738	1.044
32	Kota Salatiga	363	255	264	205	539	282
33	<b>Kota semarang</b>	<b>3.549</b>	<b>1.464</b>	<b>4.252</b>	<b>1.374</b>	<b>3.947</b>	<b>1.433</b>
34	Kota Pekalongan	309	287	538	367	506	331
35	Kota Tegal	492	246	373	169	385	155
Jumlah		19.645	12.700	21.383	13.924	20.746	12.647

*Sumber : BPS,2012*

Menurut Glaeser & Sacerdote (1999) dalam (Husnayain, 2007) menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kejahatan kota dengan jumlah penduduk atau *city size*. Hal ini menyebabkan tingkat kejahatan di kota dikhawatirkan akan meningkat. Secara teori hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: lebih tingginya keuntungan aksi kejahatan (harta benda korban kejahatan) di Kota daripada di desa, kecilnya probabilitas tertangkap (kecilnya *expected cost* bagi penjahat) di Kota akibat tingginya kepadatan penduduk, dan menariknya Kota terhadap tindak kejahatan individu (Hakim, 2009).

Menurut penelitian Sjoquist (1973) dalam Hardianto (2009) juga menunjukkan adanya hubungan jumlah penduduk yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kejahatan properti. Berikut ini adalah jumlah penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2012. Dimana jumlah penduduk Kota Semarang pada tiga tahun terakhir ini selalu mengalami peningkatan, yaitu tahun 2010 sebanyak 1.555.984 jiwa dan tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 1.629.924 jiwa atau naik sebesar 5%. Dibandingkan dengan enam kota lainnya yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan Kota yang paling tinggi jumlah penduduknya, dan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki tingkat pertumbuhan yang paling tinggi. Berikut ini adalah data tentang tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota tahun 2010 – 2012.



**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Jumlah Penduduk Jawa Tengah**  
**Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2010 – 2012**

No	Kabupaten / Kota	2010	2011	2012	Pertumbuhan (%)
1	Kab. Cilacap	1.642.107	1.651.940	1.679.864	2
2	Kab. Banyumas	1.554.527	1.570.598	1.603.037	3
3	Kab. Purbalingga	848.952	858.798	877.489	3
4	Kab. Banjarnegara	868.913	875.214	890.962	3
5	Kab. Kebumen	1.159.926	1.162.294	1.181.678	2
6	Kab. Purworejo	695.427	696.141	708.483	2
7	Kab. Wonosobo	754.883	758.993	771.447	2
8	Kab. Magelang	1.181.723	1.194.353	1.219.371	3
9	Kab. Boyolali	930.531	936.822	953.317	2
10	Kab. Klaten	1.130.047	1.135.201	1.153.047	2
11	Kab. Sukoharjo	824.238	832.094	848.718	3
12	Kab. Wonogiri	928.904	929.870	946.373	2
13	Kab. Karanganyar	813.196	821.694	838.762	3
14	Kab. Sragen	858.266	861.939	875.283	2
15	Kab. Grobogan	1.308.696	1.316.693	1.339.127	2
16	Kab. Blora	829.728	833.786	847.125	2
17	Kab. Rembang	591.359	596.801	608.548	3
18	Kab. Pati	1.190.993	1.198.935	1.219.993	2
19	Kab. Kudus	777.437	788.264	807.005	4
20	Kab. Jepara	1.097.280	1.115.688	1.144.916	4
21	Kab. Demak	1.055.579	1.067.993	1.091.379	3
22	Kab. Semarang	930.727	944.877	968.383	4
23	Kab. Temanggung	708.546	715.907	730.720	3
24	Kab. Kendal	900.313	908.533	926.325	3
25	Kab. Batang	706.764	713.942	728.578	3
26	Kab. Pekalongan	838.621	845.471	861.366	3
27	Kab. Pemalang	1.261.353	1.264.535	1.285.024	2
28	Kab. Tegal	1.394.839	1.399.789	1.421.001	2
29	Kab. Brebes	1.733.869	1.742.528	1.770.480	2
30	Kota Magelang	118.227	118.606	120.447	2
31	Kota Surakarta	499.337	501.650	509.576	2
32	Kota Salatiga	170.332	173.056	177.480	4
33	<b>Kota semarang</b>	<b>1.555.984</b>	<b>1.585.417</b>	<b>1.629.924</b>	<b>5</b>
34	Kota Pekalongan	281.434	284.413	290.347	3
35	Kota Tegal	239.599	240.777	244.632	2
Jumlah		32.382.657	32.643.612	33.270.207	3

*Sumber : BPS Jawa Tengah, diolah*

Pada umumnya para pelaku tindak kejahatan melakukan hal ilegal tersebut karena perkiraan kepuasan yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang pasti mereka dapatkan apabila mengikuti hukum yang berlaku atau perbuatan legal (Sullivan, 2007). Menurut Sullivan (2007) strategi yang dianggap mampu menurunkan tingkat kriminalitas antara lain dengan meningkatkan ketegasan dalam hukuman yang akan diterima para kriminal atau dengan meningkatkan upah pekerjaan yang legal. Upah atau pendapatan mencerminkan insentif dalam melakukan kejahatan yang memiliki dampak signifikan dan besar pada tingkat kejahatan itu sendiri (Machin dan Meghir, 2003). Upah minimum mempunyai hubungan negatif terhadap kejahatan kekerasan, kejahatan properti, maupun total kejahatan. Rendahnya upah minimum akan berdampak meningkatkan angka kejahatan (Summerfield, 2006). Menurut Hardianto (2009) tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Dimana Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang rendah mengakibatkan tingginya angka kriminalitas disebuah Kabupaten/Kota tersebut.

Kota Semarang mempunyai UMK tertinggi di Provinsi Jawa Tengah yang selalu mengalami kenaikan, hal ini ditunjukan pada Tahun 2010 sebesar 939.756, dan pada Tahun 2012 sebesar 991.500. Akan tetapi tingkat pertumbuhan UMK di Kota Semarang dari tahun 2010 – 2012 yang hanya mencapai 6%. Bila di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengan, Kota Semarang mempunyai tingkat pertumbuhan yang paling kecil. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Pertumbuhan Upah Minimum Kabupaten / Kota**  
**Menurut Kabupaten / Kota di Jawa Tengah**  
**Tahun 2010 – 2012**

No	Kabupaten / Kota	2010	2011	2012	Pertumbuhan (%)
1	Kab. Cilacap	689.333	718.666	852.000	24
2	Kab. Banyumas	670.000	750.000	795.000	19
3	Kab. Purbalingga	695.000	765.000	818.500	18
4	Kab. Banjarnegara	662.000	730.000	765.000	16
5	Kab. Kebumen	700.000	727.500	770.000	10
6	Kab. Purworejo	719.000	755.000	800.000	11
7	Kab. Wonosobo	715.000	775.000	825.000	15
8	Kab. Magelang	752.000	802.000	837.000	11
9	Kab. Boyolali	748.000	800.500	836.000	12
10	Kab. Klaten	735.000	766.022	812.000	10
11	Kab. Sukoharjo	769.500	790.500	843.000	10
12	Kab. Wonogiri	695.000	730.000	775.000	12
13	Kab. Karanganyar	761.000	801.500	846.000	11
14	Kab. Sragen	724.000	760.000	818.000	13
15	Kab. Grobogan	687.500	735.000	785.000	14
16	Kab. Blora	742.000	816.200	855.500	15
17	Kab. Rembang	702.000	757.600	816.000	16
18	Kab. Pati	733.000	769.550	837.500	14
19	Kab. Kudus	775.000	840.000	889.000	15
20	Kab. Jepara	702.000	758.000	800.000	14
21	Kab. Demak	813.400	847.987	893.000	10
22	Kab. Semarang	824.000	880.000	991.500	20
23	Kab. Temanggung	709.500	779.000	866.000	22
24	Kab. Kendal	780.000	843.750	904.500	16
25	Kab. Batang	745.000	805.000	880.000	18
26	Kab. Pekalongan	760.000	810.000	873.000	15
27	Kab. Pemalang	675.000	725.000	793.000	17
28	Kab. Tegal	687.000	725.000	780.000	14
29	Kab. Brebes	681.000	717.000	775.000	14
30	Kota Magelang	745.000	795.000	837.000	12
31	Kota Surakarta	785.000	826.252	864.450	10
32	Kota Salatiga	803.185	843.469	901.396	12
33	<b>Kota Semarang</b>	<b>939.756</b>	<b>961.323</b>	<b>991.500</b>	<b>6</b>
34	Kota Pekalongan	760.000	810.000	895.500	18
35	Kota Tegal	700.000	735.000	795.000	14

*Sumber : BPS, Jawa tengah Dalam Angka 2013*

Menurut Nanang kenaikan BBM nantinya akan berdampak luas bagi kehidupan sebagian besar masyarakat, tak terkecuali buruh. Kehidupan buruh akan semakin berat karena upah yang diterima tak akan cukup untuk biaya hidup. Kondisi ini membuat upah yang diterima buruh tak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarga secara layak selama 1 bulan (Media Chanel Independen, 3 Maret 2012).

Melihat hal tersebut di atas, dikhawatirkan seseorang akan melakukan suatu tindakan ( legal atau ilegal ) untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya, mengingat UMK di Kota Semarang masih tergolong rendah. Menurut Mayer tahun 1835-1861 di Bremen, Jerman, dalam (yancsdotme.wordpress.com ) berdasarkan statistic, terdapat hubungan, korelasi antara kenaikan tingkat kejahatan dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok (sembako).

**Tabel 1.4**  
**Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi**  
**Yang Ditamatkan Di Kota Semarang Tahun 2010 – 2012**

TAHUN	PENDIDIKAN TERAKHIR (orang)				
	SD	SMP	SMA	AKADEMI/D3	UNIVERSITAS
2010	321.570	285.235	296.788	61.133	62.526
2011	325.072	288.341	300.020	61.798	63.207
2012	338.144	291.066	320.865	62.382	63.805

*Sumber : Semarang Dalam Angka, 2011 – 2012*

Tabel 1.4 menunjukkan jumlah penduduk usia lima tahun ke atas di Kota Semarang masih didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Hal ini ditunjukkan jumlah penduduk dengan pendidikan terakhir SD pada tahun 2010 sebesar 321.570 jiwa dan tahun 2012 sebesar 338.144 jiwa, sedangkan untuk penduduk tamatan SMP pada tahun 2010 sebesar 258.235 jiwa dan pada tahun

2012 sebesar 291.066 jiwa. Menurut Lochner (2007) semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang (lulusan SD dan SMP) dapat disimpulkan bahwa ketrampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan para lulusan sekolah menengah hingga universitas, dan waktu luang yang dimiliki oleh lulusan SD hingga SMP akan lebih banyak dibandingkan lulusan SMA hingga universitas. Sehingga ketersediaan waktu luang yang berlebih itu bisa menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminalitas.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kota Semarang**  
**Tahun 2010 – 2012**

Kelompok Umur	2010	2011	2012
0-4	146262	125565	131209
5-9.	113587	130638	129090
10-14.	111253	137297	142129
<b>15-19</b>	<b>137860</b>	<b>131273</b>	<b>137077</b>
<b>20-24</b>	<b>139727</b>	<b>146493</b>	<b>157777</b>
<b>25-29</b>	<b>148130</b>	<b>143956</b>	<b>162829</b>
30-34	128991	133334	135284
35-39	118099	124138	135284
40-44	113120	120175	107738
45-49	106585	107174	122896
50-54	102228	99089	81333
55-59	70953	59770	75628
60-64	36721	44550	41400
65-69	33454	27745	24775
70-74	24118	23940	24286
75+	25051	30123	21515

*Sumber : BPS,2012*

Husnayain (2007) Usia 15 – 29 adalah usia produktif untuk bekerja dan berpotensi besar untuk melakukan kejahatan dibandingkan usia dan jenis kelamin lainnya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa semakin tinggi persentase pria pada usia 15-29 tahun dalam sebuah provinsi maka semakin tinggi pula peluang

provinsi tersebut memiliki tingkat kejahatan properti yang tinggi. Pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa Jumlah penduduk Kota Semarang masih didominasi oleh penduduk yang masih berusia Produktif, yaitu umur 15 – 29 tahun dengan jumlah 425.717 jiwa di Tahun 2010 dan mengalami kenaikan sebesar 457.683 jiwa di Tahun 2012.

Menurut argumen Ramadani (2012) yang menyebutkan bahwa paling banyak melakukan pencurian, salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor yaitu pelaku yang berumur antara 15-30 tahun. Hal ini disebabkan karena pada usia antara 15 – 30 tahun pemikiran mereka masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat. Berikut ini adalah pola pelaku kejahatan berdasarkan umur di Kota Semarang tahun 2010 – 2012.

**Tabel 1.6**  
**Pola Pelaku Kejahatan Berdasarkan Umur di Kota Semarang**  
**Tahun 2010 – 2012**

UMUR	TAHUN						JML
	2010		2011		2012		
	L	P	L	P	L	P	
0 – 14	6	1	8	0	6	0	21
15 – 19	133	6	166	12	164	6	487
20 – 24	278	10	243	10	270	10	821
25 – 34	382	32	393	21	366	30	1224
35 – 44	304	33	207	29	234	19	826
45 – 64	126	11	96	10	81	10	334
65 +	8	2	1	0	3	0	14
Belum Diketahui	121	12	129	8	168	1	439
JUMLAH	1.358	107	1.243	90	1.292	76	4166

*Sumber : Polrestabes Semarang, 2012*

Tabel 1.6 dapat dilihat mayoritas seseorang yang melakukan tindakan kejahatan adalah seseorang yang berusia produktif, yaitu yang menduduki urutan tertinggi usia 25 – 34 tahun sebanyak 1.224 pelaku kejahatan, kemudian usia 35 – 44 sebanyak 825 dan usia 20 – 24 sebanyak 821 pelaku kejahatan.

Berbagai studi menunjukkan keterkaitan yang kuat antara ketimpangan dan tingkat kriminal. Lederman *et al.* (2001) dalam (Indonesiasetara.org,2013) menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan faktor penyebab tindakan kriminal, sehingga semakin timpang suatu kota atau negara semakin tinggi tingkat kriminalitasnya. Pandangan ini dikuatkan oleh Kennedy *et al.* (1998) dalam (Indonesiasetara.org,2013) yang mengatakan bahwa ketimpangan mendorong perilaku kriminal.

**Tabel 1.7**  
**Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Indeks Gini di Kota Semarang**  
**Tahun 2010 – 2012**

Tahun	Kota Semarang
2010	0,3224
2011	0,3545
2012	0,3518

*Sumber : BPS,2012*

Tingginya ketimpangan di Kota Semarang membuktikan bahwa adanya jarak yang nyata antara si kaya dan si miskin. Jarak tersebut yang kemudian memicu munculnya kriminalitas di lingkungan sekitar kita. Berikut ini adalah tingginya jumlah penduduk miskin yang berada di enam Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012.

**Tabel 1.8**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kota di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2010 – 2012**

Kota	2010	2011	2012
Magelang	12.400	13.100	12.100
Surakarta	69.800	64.500	59.700
Salatiga	14.200	13.300	12.300
<b>Semarang</b>	<b>79.700</b>	<b>88.500</b>	<b>81.900</b>
Pekalongan	26.400	28.300	26.200
Tegal	25.700	25.900	24.000

*Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2013*

Pada Tabel 1.8 memperlihatkan bahwa tingginya jumlah penduduk yang miskin di Kota Semarang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebanyak 79.700 jiwa dan naik sebesar 81.900 jiwa. Hal tersebut di atas jumlah penduduk yang miskin atau tingginya angka kemiskinan akan dikhawatirkan semakin tingginya jumlah kejahatan di Kota Semarang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2011) menyatakan bahwa faktor kemiskinan merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan tindak kriminal.

**Tabel 1.9**  
**Pola Aspek Kejahatan Berdasarkan Motif di Kota Semarang**  
**Tahun 2010 – 2012**

MOTIF	Tahun			JUMLAH
	2010	2011	2012	
Balas dendam	295	148	271	714
Kebutuhan / Ekonomi	2.344	3.328	2.897	8.569
Korupsi / Memperkaya diri	13	3	11	27
Ideologi	2	10	26	38
Lain - lain	883	739	643	2.265
<b>JUMLAH</b>	<b>3.537</b>	<b>4.228</b>	<b>2.265</b>	<b>11.613</b>

*Sumber : Polrestabes Semarang, 2012*



Tabel 1.9 yang menjelaskan beberapa alasan untuk motivasi pelaku melakukan tindak kejahatan. Dari 11.163 kasus kejahatan selama tiga tahun terakhir ini di Kota Semarang, sebanyak 8.569 kasus yang dimotivasi oleh kebutuhan atau faktor ekonomi. Masyarakat yang sudah terdesak secara ekonomi akan nekat melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kebutuhannya (Lestari,2011).

Menurut Ramadani (2012) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa seseorang atau para pelaku tindak kejahatan mempunyai desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan seseorang sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian. Misalnya, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan dan pencurian disertai kekerasan. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat. Dari banyaknya kasus kejahatan di Kota Semarang , kasus pencurian {pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian dengan kekerasan (curas)} merupakan kasus yang paling tinggi bila dibandingkan dengan kasus – kasus yang lain seperti, kebakaran, penganiayaan berat (anirat), pembunuhan, uang palsu (upal), narkoba, penipuan dan perkosaan.

Hal ini bisa dilihat, pada tahun 2010 sebanyak 1.069 kasus, tahun 2011 sebanyak 1.535 kasus dan tahun 2012 sebanyak 1.382. Kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat Kota Semarang tahun 2010 – 2012 secara detail dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut ini.

**Tabel 1.10**  
**Kejahatan yang Meresahkan Masyarakat Kota Semarang Per Kasus**  
**Tahun 2010 – 2012**

No	Jenis Kejahatan	2010	2011	2012	Jumlah
1	<b>Curat</b>	<b>378</b>	<b>593</b>	<b>521</b>	<b>1492</b>
2	<b>Curanmor</b>	<b>645</b>	<b>884</b>	<b>768</b>	<b>2297</b>
3	<b>Curas</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>93</b>	<b>188</b>
4	kebakaran	9	14	11	<b>34</b>
5	Anirat	69	171	63	<b>303</b>
6	Pembunuhan	2	7	14	<b>23</b>
7	Upal	1	2	2	<b>5</b>
8	Narkotika	39	40	63	<b>142</b>
9	Penipuan	406	578	511	<b>1495</b>
10	Perkosaan	17	5	3	<b>25</b>

*Sumber : Polrestabes Semarang 2012*

Tingginya tingkat kejahatan yang terjadi tentu seharusnya mendorong pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan guna menurunkan jumlah tindak kejahatan, salah satunya dengan menambahkan jumlah personil kepolisian. Tabel 1.11 menyajikan jumlah personil kepolisian di Polrestabes Semarang sejak tahun 2010. Peningkatan cukup ekstrim terjadi pada tahun 2011 yang disebabkan oleh perubahan sistem dari tahun 2010, yaitu Polwiltabes diubah menjadi Polrestabes, yang langsung membawahi Polsek – polsek di Kota Semarang.

**Tabel 1.11**  
**Jumlah Personil Polisi di Kota Semarang**  
**Tahun 2010 – 2012**

TAHUN	JUMLAH PERSONIL		TOTAL PERSONIL
	L	P	
2010	1.687	74	1.761
2011	2.861	168	3.029
2012	2.706	157	2.863

*Sumber : Polrestabes Semarang, 2012*

Menyikapi hal tersebut diatas, sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, bagaimana pemicu perkembangan tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang dengan pendekatan ekonomi. Oleh sebab itu penulis mengambil judul penelitian “**PENGARUH UMUR, TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, DAN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PENDEKATAN EKONOMI (Studi Kasus: Narapidana Di LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang )**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas maka, bahwa jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan jumlah kejahatan yang tinggi pula. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 . Penduduk Kota Semarang yang masih didominasi oleh penduduk usia Produktif, yaitu umur 15 – 29 tahun dengan jumlah 425.717 jiwa di Tahun 2010 dan mengalami kenaikan sebesar 457.683 jiwa di Tahun 2012. Rata – rata usia seseorang yang melakukan tindak kejahatan di Kota Semarang adalah mereka yang berusia produktif 15 – 30 tahun. Hal ini serupa dengan argumen Ramadani ( 2012 ) yang menyebutkan bahwa paling banyak melakukan

tindak pencurian kendaraan bermotor adalah pelaku yang berusia antara 15 – 30 tahun. Hal ini disebabkan karena pada usia tersebut, pemikiran mereka masih banyak dipengaruhi lingkungan, perubahan – perubahan sosial dan perkembangan masyarakat.

Kota Semarang memiliki tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota paling tinggi bila dibandingkan dengan Kota lain akan tetapi jumlah kejahatan di Kota Semarang juga ikut tinggi. Hal ini kemungkinan besar Upah Minimum Kabupaten/Kota Semarang masih tergolong rendah, sehingga seseorang akan melakukan tindakan ( legal atau ilegal ) untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan yang melambung tinggi .

Penduduk di Kota Semarang menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2010 – 2012 masih didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan rendah yaitu penduduk dengan tingkat pendidikan SD dan SMP. Menurut Lochner (2007) semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang (lulusan SD dan SMP) dapat disimpulkan bahwa keterampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan para lulusan sekolah menengah hingga universitas, dan waktu luang yang dimiliki oleh lulusan SD hingga SMP akan lebih banyak dibandingkan lulusan SMA hingga universitas. Hal ini penduduk dengan tingkat pendidikan rendah berpotensi melakukan tingkat kejahatan.

Desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan seseorang lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Hal ini akan mempengaruhi seseorang

untuk melakukan tindakan kejahatan atau tindak pencurian ( Ramadani, 2012 ). Hal ini bisa dilihat dari tabel 1.9 bahwa sebagian besar pelaku tindak kejahatan di Kota Semarang didasari oleh faktor ekonomi atau kebutuhan hidup.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian. Dari banyaknya kasus kejahatan di Kota Semarang , kasus curanmor, kasus curat dan kasus curas merupakan kasus yang paling tinggi bila dibandingkan dengan kasus – kasus yang lain seperti, kebakaran, anirat, pembunuhan, upal, narkoba, penipuan dan perkosaan, seperti yang dijelaskan pada tabel 1.10.

Dari uraian di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pengaruh variabel umur terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang ?
2. Bagaimana pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang ?
3. Bagaimana pengaruh variabel pendapatan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang ?
4. Bagaimana pengaruh variabel jumlah tanggungan keluarga terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel umur terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel pendapatan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel tanggungan keluarga terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi penulis

Diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan pencurian dan cara penanggulangannya.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang kondisi kerawanan di Kota Semarang, sehingga masyarakat harus berhati – hati.

3. Bagi Pemerintahan Kota Semarang

Diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah Kota Semarang dalam mengalokasikan jumlah tenaga keamanan seperti jumlah polisi perkapita dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan di Kota Semarang.

#### 4. Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai bahan referensi bagi pengembangan penulisan selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah mengapa tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang menjadi menarik untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

#### Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori yang menjadi dasar penelitian. Teori yang digunakan merupakan teori yang berpijak pada ekonomi pembangunan, ekonomi mikro, pengantar psikologi dan bahasan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Selain itu disusun juga kerangka pemikiran penulis tentang penelitian yang akan dilakukan.

#### Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan dengan menggunakan variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis regresi.

#### Bab IV : Hasil Dan Analisis

Bab ini menjelaskan secara singkat keadaan wilayah Kota Semarang sebagai objek penelitian, kemudian menuju ke analisis data dan pembahasan hasil analisis.

#### Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan berkaitan tentang tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang dan beberapa faktor yang mempengaruhinya.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Definisi Kejahatan**

Dalam pengertian sosiologis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia, yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, namun dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat secara ekonomis, psikologis, dan melukai perasaan sosial dalam kehidupan bersama. Kejahatan bersifat universal dan tidak terbatas ruang dan waktu disebabkan ia bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Sebagai sebuah fenomena sosial, kejahatan adalah penyakit dalam sebuah komunitas dan keberadaannya harus diperangi, sebagaimana ilmu hukum memerangi kejahatan karena merupakan sebuah pelanggaran (Sosilo, 1985) dalam Husnayain (2007).

Ilmu kriminologi memandang konsep kejahatan berbeda dengan konsep kejahatan dalam hukum. Dalam kriminologi orang disebut penjahat jika pola tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap. Tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan karakter dari orang tersebut. Sifat dan tingkah laku yang menetap artinya tingkah laku tersebut sudah menjadi karakter pelakunya dan merupakan pola tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga ilmu kriminologi berfokus pada gejala kejahatan dengan memperhatikan kebiasaan perbuatan jahat tersebut dan melandaskan diri pada ilmu-ilmu sosiologi, hukum dan psikologi, sehingga sedapat mungkin analisis pendekatan yang dilakukan

dapat lebih komprehensif menjelaskan fenomena sosial yang terjadi (Mustofa, 2005) dalam Husnayain (2007).

Kejahatan oleh kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: kejahatan dengan kekerasan, kejahatan properti, kejahatan terorganisir, dan kejahatan melawan ketertiban publik. Kejahatan dengan kekerasan menempatkan fisik korban dalam kondisi terancam di mana sebagian besar kejahatan ini bertujuan untuk melukai korbannya. Aksi kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dengan kekerasan adalah: pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan perampokan.

Menurut ilmu ekonomi memandang kejahatan sebagai fenomena yang harus diberantas disebabkan dampaknya yang menimbulkan banyak biaya baik secara materil maupun non-materil. Sedangkan kerangka ekonomi merupakan salah satu pendekatan yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya dalam memberantasnya (Becker, 1968) dalam Husnayain (2007). Dalam penerapannya, analisis ekonomi kejahatan lebih banyak menggunakan data kejahatan properti, yaitu kejahatan atas harta benda. Antara lain yaitu: pencurian, perampokan, pembobolan rumah, dan lain-lain.

### **2.1.2 Kejahatan Pencurian**

Menurut Poerwardarminta (1984:217) dalam Ramadani (2012) Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa.
2. Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.
3. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.
4. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

### **2.1.3 Biaya dan Kejahatan**

Menurut Richard dkk (2000) dalam Hakim (2009) Meskipun biaya langsung yang terbesar ditanggung oleh korban kejahatan, bukan berarti korban kejahatan merupakan satu-satunya pihak yang menanggung biaya kejahatan. Aksi kejahatan menimbulkan biaya bagi setidaknya empat pihak yaitu: korban, potensial korban, pelaku, dan publik.

### 2.1.3.1 Biaya Korban dan Kejahatan

Korban kejahatan didefinisikan sebagai pihak yang menderita tindak kejahatan. Korban kejahatan menanggung biaya langsung berupa hilangnya barang berharga yang dimiliki, biaya perawatan medis akibat luka fisik dan non fisik yang dialami, serta rusaknya properti pengamanan akibat pembobolan. Biaya ini merupakan komponen biaya langsung yang dapat dikuantifisir dengan cara menghitung jumlah total harta rampasan yang diambil pelaku, biaya perbaikan properti/alat pengamanan, serta biaya berobat korban (Hakim, 2009).

Selain itu, terdapat *opportunity cost* berupa waktu bekerja yang hilang selama pemulihan dikalikan upah kerja. *Opportunity cost* tersebut akan semakin besar apabila korban tidak mampu menanggulangi beban mental trauma akibat tindak kejahatan. Beban mental ini berupa *posttraumatic stress disorder* (PTSD) yaitu kondisi trauma pasca terjadinya kejahatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi mental korban (Hakim, 2009).

### 2.1.3.2 Biaya Potensial Korban

Masyarakat dapat lebih optimal mengalokasikan sumber daya mereka jika tidak ada masalah kejahatan. Potensial korban akan menanggung beban berupa penambahan alat-alat pengamanan (untuk mengantisipasi tindak kejahatan), belanja asuransi untuk mengurangi resiko kejahatan, penurunan kualitas hidup akibat ketakutan (akan terjadinya tindak kejahatan), dan *opportunity cost* dari aktivitas bebas yang terhalang (akibat ketakutan terhadap kejahatan).

Meskipun begitu, terdapat irisan luas antara komponen belanja penambahan alat-alat pengamanan, dengan belanja publik yang normal untuk

mencegah kejahatan. Diferensiasi dari kedua komponen ini adalah perbandingan tingkat kejahatan di sebuah daerah. Tingkat kejahatan yang relatif tinggi akan menyebabkan publik menambah belanja pengamanan sehingga akan lebih besar dari belanja normal yang dikeluarkan oleh sebuah komunitas yang relatif aman (Hakim, 2009).

### **2.1.3.3 Biaya Pelaku Kejahatan**

Menurut Hakim (2009) biaya pelaku kejahatan adalah *opportunity cost* dari waktu pelaku dipenjara yang bervariasi pada setiap pelaku kejahatan. Besar *opportunity cost* ini didapat dari pendapatan yang hilang selama dipenjara. Biaya ini dapat diperbesar dengan meningkatkan probabilitas tertangkap/dipenjara, memperlama waktu dipenjara, dan meningkatkan pendapatan legal pelaku. Semakin besar ketiga variabel tersebut, *opportunity cost* dari pelaku kejahatan akan semakin besar sehingga memperkecil insentif untuk melakukan tindak kejahatan.

Pendekatan ekonomi mengungkapkan bahwa terdapat tiga alasan dari pelaku kriminal dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindak kejahatan. Pertama, pelaku kejahatan properti tersebut -secara relatif- merupakan orang yang memiliki kemungkinan tertangkap sangat rendah, sementara *expected return* yang diharapkan dari harta benda hasil kejahatan (*expected loot*) sangat besar. Hal tersebut dimungkinkan karena ia memiliki pengetahuan dan keahlian dalam melakukan tindak kejahatannya. Kejahatan tipe ini umumnya terjadi pada *white collar crime*.

Kedua, pelaku kejahatan properti tersebut, apabila tertangkap dan dipenjara, memiliki *opportunity cost* yang rendah. Rendahnya *opportunity cost* disebabkan tidak produktifnya aktivitas yang dilakukan oleh mereka apabila berada di luar penjara. Hal ini menjelaskan penyebab kejahatan properti yang dilakukan oleh orang miskin.

Ketiga, pelaku kejahatan properti sama sekali tidak memiliki rasa hormat terhadap nilai dan norma dalam masyarakat sehingga tidak menganggap bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang salah. Hal ini menjelaskan mengapa kejahatan properti dapat terjadi meskipun *net-return* nya sedikit.

#### **2.1.3.4 Biaya Publik**

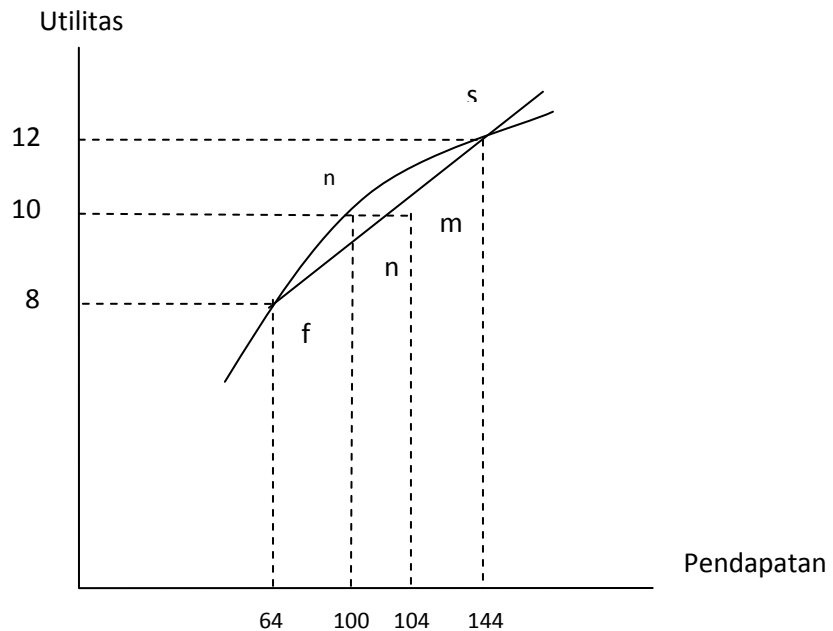
Biaya yang diemban oleh publik adalah segala biaya yang timbul berupa: pencegahan suatu tindak kejahatan, hukuman untuk pelaku kejahatan, dan penurunan kualitas lingkungan akibat tindak kejahatan. Terdapat irisan antara biaya untuk menghukum pelaku dengan biaya untuk pencegahan kejahatan. Ini disebabkan hukuman untuk kejahatan sering dimaksudkan untuk mencegah calon pelaku kejahatan melakukan aksi serupa. Biaya untuk patroli keamanan (polisi dan komponen keamanan lain) merupakan komponen biaya eksplisit yang jelas dapat dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan publik untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sukses. Sementara itu, biaya untuk penangkapan, penyidikan, penyelidikan, pengadilan, dan fasilitas rehabilitasi pelaku kejahatan merupakan biaya yang sering dianggap sebagai biaya untuk menghukum pelaku kejahatan (Hakim, 2009).

Biaya yang secara signifikan dapat dirasakan oleh publik adalah biaya penurunan kualitas lingkungan dan distorsi ekonomi akibat maraknya tindakan kejahatan di lingkungan mereka. Hasil penelitian Cullen dan Levit (1999) dalam Hakim (2009) menunjukkan bahwa peningkatan kejahatan di kota sebesar 10 persen akan menurunkan populasi kota sebesar 1 persen dengan rumah tangga berpendidikan tinggi dan rumah tangga memiliki anak yang paling responsif terhadap kejahatan tersebut.

#### **2.1.4 Pendekatan Rasional Ekonomi untuk Analisis Kejahatan**

Menurut Husnayain (2007) analisis kejahatan dengan pendekatan ekonomi menggunakan asumsi dasar bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional tanpa mempertimbangkan benar salahnya suatu hal. Yang menjadi landasan hanyalah untung dan rugi yang ia dapatkan dari pengambilan keputusan. Keputusan melakukan tindak kejahatan adalah keputusan yang rasional berdasarkan maksimisasi kepuasan (*maximum utility*). Kurva utilitas menunjukkan hubungan antara pendapatan dan kepuasan, berbentuk concave yang merefleksikan asumsi diminishing marginal utilitas pendapatan: seiring peningkatan pendapatan maka kepuasan juga akan meningkat namun dengan tingkat yang menurun. Dalam persamaan matematis sederhana, fungsi dari kepuasan adalah:  $Utilitas = (Income)^{1/2}$ .

**Gambar 2.1**  
**Ekspektasi Utilitas Kejahatan**



*Sumber : Sullivan, Arthur O'. Urban Economics, 6th Edition, hal. 261  
dalam Husnayain (2009).*

Pada Gambar 2.1, titik *c* menunjukkan hasil pendapatan di sektor legal dengan utilitas 10. Titik *s* menunjukkan pendapatan jika kejahatan tersebut sukses. Titik *f* menunjukkan hasil pendapatan jika percobaan kejahatan gagal. Dengan peluang tertangkap 0.5 maka ekspektasi kepuasan dari tindak kejahatan adalah 12 utils (titik *s*), 8 utils (titik *f*) atau 10 utils (titik *m*).



**Tabel 2.1**  
**Ekspektasi Utilitas Kejahatan**

	Basis	Peluang Dipenjara Lebih Tinggi	Waktu Dipenjara Lebih Lama	Harta Rampasan sedikit	Pendapatan Lebih Tinggi	Peluang Dipenjara Lebih Rendah
<u>Pendapatan Legal (\$)</u>	100	100	100	100	400	100
Harta Rampasan (\$)	44	44	44	21	44	44
Peluang Dipenjara	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.25
Lama waktu Dipenjara	0.36	0.36	0.51	0.36	0.36	0.36
Utilitas Legal = (Pendapatan Legal) <sup>1/2</sup>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
<u>Utilitas Kejahatan properti</u>						
<u>Sukses</u>						
Pendapatan Bersih = Pendapatan Legal + Rarta rampasan	144	144	144	121	444	144
Utilitas = (Pendapatan Bersih) <sup>1/2</sup>	12	12	12	11	21	12
<u>Utilitas Kejahatan Properti</u>						
<u>Gagal</u>						
Biaya dipenjara = Lamanya dipenjara. Pendapatan Legal	36	36	51	36	144	34
Pendapatan Bersih = pendapatan Legal - biaya dipenjara	64	64	49	64	256	64
Utilitas = (pendapatan bersih) <sup>1/2</sup>	8	8	7	8	16	8
<b>Ekspektasi Kejahatan Properti (utils)</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9.5</b>	<b>9.5</b>	<b>18.5</b>	<b>11</b>

*Sumber: Sullivan. Urban Economics, 6th Edition, hal. 262 dalam Hakim ( 2009)*

Kejahatan adalah pilihan rasional atas tindakan yang dapat memberikan ekspektasi keuntungan lebih besar dari ekspektasi biaya. Misalkan diketahui ekspektasi kepuasan kejahatan dalam Tabel 2.1, maka kita akan memiliki gambaran bagaimana perhitungan rasional terhadap ekspektasi kepuasan dari tindak kejahatan. Empat nilai pertama merupakan parameter utama. Yaitu nilai dari pendapatan di sektor legal, nilai harta rampasan, peluang dipenjara dan lamanya waktu dipenjara. Terdapat tiga kemungkinan hasil yang didapatkan: Pertama, saat pekerjaan di legal hukum menghasilkan pendapatan \$100 dan 10 utils sebagaimana ditunjukkan pada titik c pada Gambar 2.1. Kedua, saat sukses merampok dengan pendapatan \$144 (yaitu = \$100 + \$44 dari loot) dan mendapatkan 12 utils (titik s pada Gambar II.1). Ketiga, saat kejahatan tidak sukses, menghabiskan 0.36 unit dipenjara dan 0.64 unit untuk bekerja di sektor legal, sehingga pendapatan bersihnya adalah \$64 (\$100 x 0.64) dengan 8 utils (titik f pada Gambar 2.1). Sehingga jika kita mengetahui nilai peluang dari berbagai skenario di atas maka ekspektasi utilitas tindak kejahatan dapat dihitung yaitu merupakan rata-rata kedua utilitas sukses dan tidak sukses, yaitu:

$$EU \{U_1, U_2; p_1, p_2\} = p_1 \cdot U_1 + p_2 \cdot U_2 \dots\dots\dots (2.1)$$

Di mana  $p_1$  adalah peluang mendapatkan utilitas  $U_1$  dan  $p_2$  adalah peluang mendapatkan utilitas  $U_2$ . Sebagaimana dalam contoh di atas pada kolom basis yaitu:

$$EU \{12, 8; 0.5, 0.5\} = 0.5 \times 12 + 0.5 \times 8 = 10 \text{ utils}$$

Jika ekspektasi kepuasan dari tindak kejahatan bisa didapatkan, maka nilai tersebut dapat dibandingkan dengan kepuasan mendapatkan pendapatan di sektor legal.

Dengan skenario basis, maka utilitas legal akan sama dengan ekspektasi utilitas kejahatan properti. Ini menghasilkan preferensi yang sama untuk memilih salah satu di antara keduanya. Jika terdapat peningkatan peluang dipenjara maka kepuasan bekerja di sektor legal akan lebih besar daripada melakukan kejahatan, begitu pula saat waktu dipenjara diperpanjang, harta rampasan lebih sedikit, dan pendapatan sektor legal mengalami peningkatan. Sedangkan penurunan peluang dipenjara jelas akan meningkatkan ekspektasi kepuasan melakukan tindak kejahatan.

Faktanya, potensial pelaku kejahatan tidak benar-benar mengetahui berapa nilai dari peluang yang mereka miliki untuk sukses atau gagal. Sehingga usaha yang dapat dilakukan pemerintah maupun masyarakat adalah mengoptimalkan alokasi sumber daya sebaik-baiknya untuk mencapai titik paling optimal dalam mengurangi peluang suksesnya tindak kejahatan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang layak.

Lebih lanjut, model kejahatan rasional menyatakan bahwa hanya ada tiga alasan seseorang melakukan tindak kejahatan properti: pertama, beberapa orang secara relatif sangat pandai melakukan tindak kriminal sehingga kemungkinan untuk tertangkap sangat kecil sementara ekspektasi harta rampasannya sangat besar. Kedua, karena mereka memiliki opportunity cost yang sangat rendah sehingga tidak menjadi masalah saat mereka harus kehilangan waktu mereka

karena dipenjara, contohnya orang miskin yang hidup bergelandang dan tidak memiliki pekerjaan. Ketiga, karena mereka memang tidak memiliki rasa hormat terhadap norma-norma dalam masyarakat dan tidak menganggap bahwa tindak kejahatan adalah hal yang salah, sehingga tidak masalah baginya jika hanya mendapatkan hasil yang sedikit (Sullivan, 2003) dalam Husyanain (2007).

#### **2.1.4.1 Tingkat Keseimbangan Kejahatan**

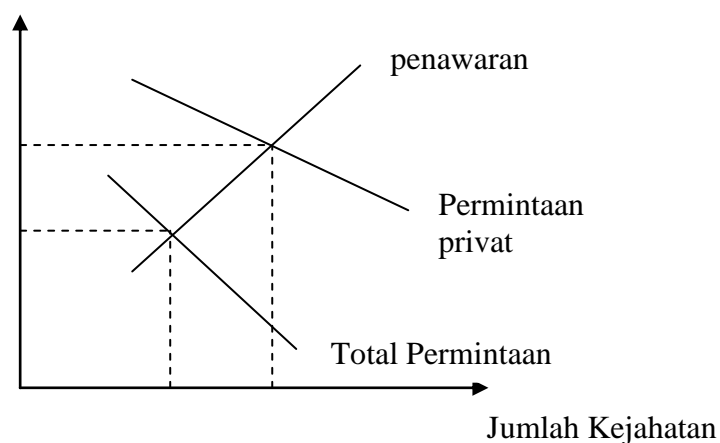
Menurut Becsi (1999) teori keseimbangan pada umumnya kejahatan juga memiliki yang terbentuk dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi penawaran, kejahatan ditekankan oleh pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan. Penawaran kejahatan tersebut memunculkan permintaan masyarakat akan perlindungan keamanan dari tindak kriminalitas di wilayahnya seperti menyewa penjaga rumah untuk mengamankan rumahnya dari tindak kejahatan. Pemerintah mempengaruhi keduanya; yaitu sebagai pemberi jasa keamanan dan pemberi hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan.

Penawaran kejahatan terbentuk karena beberapa faktor, antara lain ; ekspektasi harta rampasan, biaya langsung dalam memperoleh harta rampasan, upah rata – rata disektor legal, peluang ditangkap, dan selera tiap pelaku tindak kejahatan dalam melakukan kejahatannya (Ehrlich, 1996). Menurut Becsi (1999) ada beberapa faktor yang mengakibatkan pergeseran kurva penawaran adalah faktor demografi (perubahan proporsi pemuda), kesempatan pekerjaan yang sedikit dalam tingkat upah tertentu, dan perubahan kebijakan pemenjaraan.

Saat kejahatan tinggi, tentu permintaan dari masyarakat akan perlindungan dan penanganan akan lebih tinggi. Hal ini kemudian akan mengakibatkan peningkatan biaya melakukan tindak kejahatan sebagai dari turunnya imbalan melakukan tindak kejahatan. Peningkatan biaya kejahatan terjadi karena dari sisi pemerintah sebagai pemberi layanan publik untuk keamanan akan membuat kebijakan untuk menurunkan permintaan dan penawaran kejahatan.

**Gambar 2.2**  
**Permintaan dan Penawaran Kejahatan**

Imbalan Kejahatan



*Sumber : Becsi, 1999*

Pada Gambar 2.2 dapat kita lihat bahwa semakin tingginya penawaran kejahatan akan mendorong tingginya permintaan, dan mengurangi imbalan yang diterima pelaku kejahatan karena terpotong tingginya biaya melakukan kejahatan. Sehingga pada akhirnya jumlah kejahatan di wilayah tersebut akan menurun. Penawaran kriminalitas berhubungan positif dengan imbalan bersih dari tindak

kriminalitas. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan ketika tindak kriminalitas yang ditawarkan oleh pelaku kejahatan untuk net-return yang diberikan.

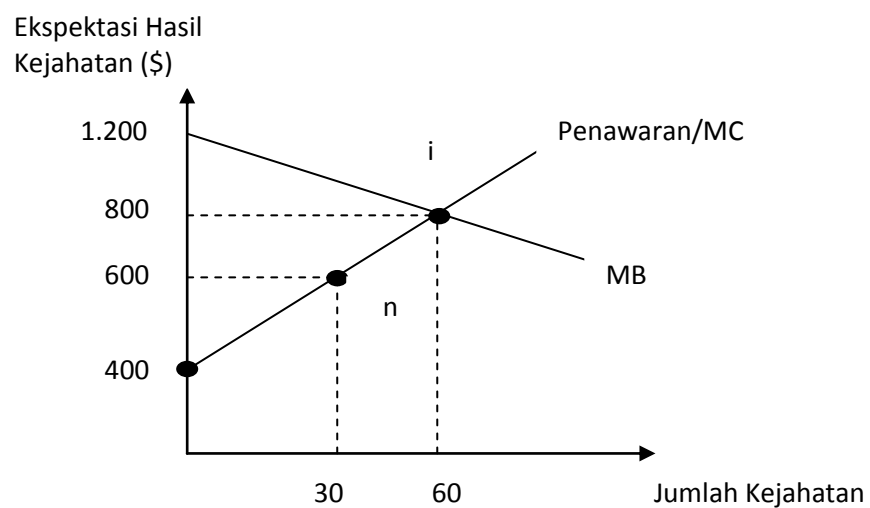
Menurut Becsi (1999) penawaran kriminalitas diperagakan seperti sebuah pilihan antara aktivitas pekerjaan yang sah menurut hukum di satu sisi dan aktivitas kriminal di sisi lain. Pilihan itu didasarkan pada imbalan yang didapatkan untuk kriminalitas, dimana imbalan bersih dari tindak kriminalitas itu sendiri (hasil jarahan) berada diatas biaya lain – lain yang berhubungan dengan kriminalitas. Biaya – biaya tersebut antara lain, upah yang dibatalkan dari aktivitas yang sah, biaya langsung dari tindak kejahatan seperti biaya penawaran, hukuman di masa depan yang sudah di ekspektasikan dari tindak kriminalitas termasuk denda, penahanan, dan sanksi lainnya.

Pada sisi permintaan kejahatan terbagi menjadi dua jenis. Pertama permintaan langsung yang berasal dari barang jarahan hasil tindak kejahatan. Kedua, permintaan tidak langsung terhadap kriminalitas yang merupakan kebalikan permintaan untuk mendapatkan perlindungan dan asuransi. Ketika penawaran kejahatan semakin tinggi. Maka permintaan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kejahatan juga semakin tinggi pula. Pemerintah sebagai pemberi jasa keamanan untuk masyarakat dan pemberi hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan, akan menurunkan penawaran ke titik keseimbangan baru. Hubungan negatif ini dikarenakan semakin meningkatnya tindak kejahatan makan individu atau seseorang akan semakin mengusahakan perlindungan kepada dirinya, yang mana tindakan individu tersebut akan

meningkatkan biaya langsung dari tindak kejahatan dan hal itu akan menurunkan imbalan yang diterima oleh para pelaku tindak kejahatan (Becsi, 1999).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Sullivan (2007) yang dapat kita lihat pada Gambar 2.3. Kurva penawaran yang menggambarkan *marginal cost* (MC) kejahatan berslope positif karena potensi kriminal yang bervariasi dalam biaya peluang (*opportunity cost*) dan biaya penderitaan (*anguish cost*). Kurva marginal benefit mempunyai slope negatif karena adanya variasi target dalam menjarah. Keseimbangan akan terjadi pada titik *i* dimana *marginal benefit* = *marginal cost* atau  $MP = MC$ .

**Gambar 2.3**  
**Keseimbangan Kejahatan**



*Sumber : Sullivan, 2007*

Pada saat jumlah kejahatan 30, maka *marginal benefit*-nya masih lebih besar dibandingkan *marginal cost*-nya. Ketika marginal benefit masih lebih besar dibandingkan *marginal cost* maka jumlah kejahatan akan terus meningkat dari 30

menjadi 60 pada titik keseimbangannya, dengan ekspektasi harga rampasan mencapai \$1.200. Akan tetapi, jika pelaku masih tetap melakukan kejahatan melebihi angka tersebut, diperkirakan mereka akan mengalami kerugian karena  $MC > MB$ -nya.

#### 2.1.4.1.1 Penawaran Pelanggaran

Becker (1968) merumuskan fungsi *supply of offense* yang dikembangkan dari motivasi pelanggar untuk berpartisipasi dalam tindak kriminalitas. Seorang individu memilih untuk berpartisipasi dalam perbuatan kriminal apabila *expected utility* yang diperoleh dengan menggunakan waktu dan sumber daya lain untuk kegiatan ilegal lebih besar daripada waktu dan sumber daya yang sama untuk kegiatan legal. Beberapa orang menjadi kriminal bukan karena perbedaan motivasi diawalnya tetapi karena perbedaan manfaat dan biaya.

Fungsi *supply of offense* yang dikembangkan Becker dapat dituliskan dalam persamaan (2) berikut ;

$$O_j = O_j(p_j, f_j, u_j) \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana :

$O_j$  : jumlah tindakan kriminal selama periode tertentu (*number of offense*)

$P_j$  : probabilitas tertangkapnya suatu tindakan kriminal (*probability of conviction per offense*)

$f_j$  : hukuman suatu tindakan kriminal (*punishment per offense*)

$u_j$  : variabel lain yang mempengaruhi individu bertindak kriminal

Peningkatan kemungkinan tertangkapnya kriminal untuk suatu tindakan kriminal ( $p_j$ ) dan hukuman dari suatu tindakan kriminal ( $f_j$ ) akan mengurangi *expected*



*utility* dari suatu tindak kriminalitas yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah tindakan kriminal pada periode tersebut. Becker (1968) juga menjelaskan variabel-variabel lain yang masuk dalam  $u_j$  adalah peningkatan pendapatan dari aktivitas legal atau peningkatan kesadaran hukum yang akan mengurangi intensif untuk melakukan perbuatan ilegal.

Selain itu, Ehrlich (1996) melalui penelitiannya yang berjudul “*Crime, Punishment, and the market for Offenses*” menyebutkan bahwa seseorang berpartisipasi dalam aktivitas ilegal karena biaya dan keuntungan dari aktivitas tersebut, yang mencakup; (1) hasil jarahan yang diekspektasikan dari aktivitas yang berlawanan dengan hukum ( $w_i$ ), (2) biaya langsung yang ditanggung oleh pelanggar untuk memperoleh hasil jarahan, termasuk didalamnya biaya untuk melindungi diri agar lolos dari hukuman ( $c_i$ ), (3) upah rata-rata dari aktivitas alternatif yang legal ( $w_l$ ), (4) kemungkinan penangkapan dan pemenjaraan ( $p_i$ ), (5) denda yang bakal di tanggung jika di penjara ( $f_i$ ), (6) selera seseorang (atau ketidaksukaan) terhadap kriminalitas yang merupakan kombinasi dari nilai moral, kecenderungan untuk melakukan kekerasan, dan pilihan untuk resiko.

Kombinasi langsung komponen tersebut menjadi keseluruhan *net-return* yang diharapkan per pelanggaran, yang dituliskan dalam persamaan berikut :

$$\pi_i = w_i - c_i - w_l - p_i f_i \dots\dots\dots (2.3)$$

#### **2.1.4.2 Pengaruh Umur Terhadap Tingkat Kejahatan**

Berdasarkan konsep karakteristik demografi, ciri utama yang digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk adalah berdasarkan umur dan jenis kelamin. Secara umum, distribusi umur penduduk dikelompokkan menurut umur

satu tahunan atau lima tahunan. Namun, bisa juga pengelompokan penduduk menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan seperti pengelompokan penduduk menurut usia sekolah.

Selain distribusi umur penduduk, dalam analisis demografi dikenal pula struktur umur penduduk yang dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu (Adioetomo dan Samosir, 2011) :

1. Penduduk usia muda, yaitu penduduk usia dibawah 15 tahun atau kelompok umur 0-14 tahun
2. Penduduk usia produktif, yaitu penduduk umur 15 – 29 tahun
3. Penduduk usia lanjut, yaitu penduduk umur 60 tahun ke atas

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan Witte (1997) dalam (Witte dan Witt, 2000) yang menunjukkan bahwa “hanya 50 sampai 60 persen laki-laki muda telah terlibat dalam tindakan nakal pada saat mereka berusia 18 dan kurang dari 10 persen telah ditangkap pada usia 30”. Moffit (1993) dalam (Witte dan Witt, 2000) juga menambahkan “angka aktual perilaku ilegal sejauh ini begitu tinggi selama masa remaja bahwa partisipasi dalam kenakalan tampaknya menjadi bagian normal dari kehidupan remaja”. Machin dan Meghir (2004) pun mengungkapkan bahwa sebagian besar kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang relatif muda dan kemungkinan akan berkorelasi negatif dengan ukuran upah.

Menurut Husnayain (2007) Usia 15 – 29 adalah usia produktif untuk bekerja dan berpotensi besar untuk melakukan kejahatan dibandingkan usia dan jenis kelamin lainnya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa semakin tinggi persentase pria pada usia 15 – 29 tahun dalam sebuah provinsi maka semakin

tinggi pula peluang provinsi tersebut memiliki tingkat kejahatan properti yang tinggi. Hal ini juga serupa dengan argumen Ramadhani (2012) yang menyebutkan bahwa paling banyak melakukan pencurian, salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor yaitu pelaku yang berumur antara 15 – 30 tahun. Hal ini disebabkan karena pada usia antara 15 – 30 tahun pemikiran mereka masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor.

#### **2.1.4.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kejahatan**

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat terlihat dari tingkat pendidikan rata-rata suatu daerah yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari meningkatnya permintaan akan pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik, karena untuk memperoleh pekerjaan di sektor modern sangat tergantung oleh pendidikan mereka (Todaro & Smith, 2004). Dari sisi lain, tingginya partisipasi masyarakat untuk bersekolah juga akan menurunkan kemampuan mereka untuk melakukan tindak kriminalitas karena waktu mereka sebagian besar akan habis untuk bersekolah (Lochner, 2007).

Menurut Todaro (2004) bahwa permintaan akan pendidikan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang bagi siswa itu sendiri maupun keluarganya serta biaya-biaya pendidikan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus

dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan/ keluarganya. Sedangkan dari sisi penawaran, jumlah sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan universitas lebih banyak ditemukan oleh proses politik, yang seringkali tidak berkaitan dengan kriteria ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lochner (2007) ada hubungan negatif antara tingkat pendidikan dan tingkat kejahatan. Pertama, pendidikan yang tinggi dapat membawa atau memperoleh pekerjaan yang legal. Kedua, seseorang yang berpendidikan tinggi akan cenderung berfikir untuk bertindak kriminal, karena manfaat yang terlalu kecil. Jadi pendidikan secara tidak langsung akan mempengaruhi tindak kejahatan melalui peningkatan upah.

Lochner (2007) juga berargumen bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang (lulusan SD dan SMP) dapat disimpulkan bahwa ketrampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan para lulusan sekolah menengah hingga universitas, dan waktu luang yang dimiliki oleh lulusan SD hingga SMP akan lebih banyak dibandingkan lulusan SMA hingga universitas. Sehingga ketersediaan waktu luang yang berlebih itu bisa menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminalitas.

Analisis yang dilakukan oleh Ehrlich (1973) dalam Oliver (2002) pendidikan merupakan hal yang penting bagi penduduk suatu negara, karena pendidikan membantu untuk menentukan manfaat yang akan diharapkan baik dari kegiatan legal maupun illegal. Sejah ini bahwa pendidikan membuat individu lebih menghindari resiko, hal ini akan cenderung untuk mencegah kejahatan.

#### **2.1.4.4 Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Kejahatan**

Berbagai penelitian membuktikan bahwa kesempatan yang lebih baik dalam memperoleh pendapatan akan mengurangi kejahatan, khususnya kejahatan properti: Doyle, Ahmed dan Horne (1999) dalam Husnayain (2007) membuktikan bahwa upah yang telah dibobotkan dengan jumlah pekerja di sektor legal memiliki hubungan yang positif terhadap kejahatan properti. Bagaimanapun, tingkat pendapatan masyarakat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kejahatan properti secara positif maupun negatif. Ia memiliki hubungan positif saat tingkat pendapatan tersebut merupakan ekspektasi harta rampasan yang akan diperoleh. Ini menjelaskan mengapa kejahatan properti banyak terjadi di kota-kota besar yang memiliki tingkat pendapatan tinggi. Sedangkan pendapatan memiliki efek negatif saat pelaku merupakan pembanding ekspektasi keuntungan sektor ilegal dan legal, sebagaimana telah dijelaskan dalam model rasional kejahatan.

Menurut Nugroho (2009) Variabel tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Dimana Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang rendah mengakibatkan tingginya angka kriminalitas di sebuah Kabupaten/Kota tersebut. Upah minimum mempunyai hubungan yang negatif terhadap kejahatan dengan kekerasan, kejahatan properti dan total kejahatan, semakin rendahnya upah minimum akan berdampak negatif terhadap kekerasan dan kejahatan (Summerfield, 2006).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2012) menggambarkan bahwa tingkat pendapatan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang paling banyak adalah yang dikategorikan dalam tingkat berpendapatan rendah,

pendapatannya sekitar kurang dari Rp. 250.000 per bulan sebanyak 16 orang atau 80% sedangkan yang berpendapatan sedang antara Rp. 251.000 s/d Rp. 900.000 per bulan mencapai 4 orang atau sekitar 20%.

#### **2.1.4.5 Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Tingkat Kejahatan**

Umumnya penduduk yang berpendidikan rendah akan memiliki tingkat pendapatan rendah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keterbatasan dalam ekonomi membuat semua anggota keluarga yang dianggap mampu untuk bekerja guna untuk menambah pendapatan keluarga sehingga kebutuhan hidup keluarga dapat terpenuhi ( Sumarsono, 2003).

Menurut Ramadhani (2012) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa seseorang atau para pelaku tindak kejahatan mempunyai desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan seseorang sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian kali ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang digunakan sebagai acuan utama adalah Zsolt Becsi (1999),

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Zsolt Becsi (1999) <i>Economics and Crime in the States</i>	Var. Dependen : Tingkat kejahatan  Var. Independen : Kepadatan penduduk; usia 15 – 19 tahun; usia 20 – 24 tahun; pengangguran; pendapatan seseorang; pendidikan; tahanan; pengeluaran polisi; jumlah polisi	Regresi Panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel kepadatan penduduk memiliki hubungan positif dan tidak signifikan</li> <li>- Variabel usia memiliki hubungan positif dan signifikan</li> <li>- Variabel pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan</li> <li>- Variabel pendapatan personal memiliki hubungan positif dan signifikan</li> <li>- Variabel kesejahteraan memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan</li> <li>- Variabel pendidikan memiliki hubungan positif dan tidak signifikan</li> <li>- Variabel narapidana memiliki hubungan negatif dan signifikan</li> <li>- Variabel pengeluaran polisi memiliki hubungan positif dan signifikan</li> <li>- Variabel personil kepolisian memiliki hubungan positif dan signifikan</li> </ul>
2	Alison Oliver (2002)	Var. Dependen : Tingkat Kejahatan	Menggunakan Metode OLS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regresi I : (Variabel Ekonomi) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lulusan sekolah menengah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan</li> </ul> </li> </ul>

	<i>The Economics of Crime: An Analysis of Crime Rates in America</i>	Var. Independen : Variabel Ekonomi; Variabel Pencegah; Variabel Demografi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah yang terdaftar sekolah menengah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan</li> <li>• GDP perkapita memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan</li> <li>• Indeks Gini memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan</li> <li>• Pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan : (Variabel Pencegah)</li> <li>• Jumlah polisi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan</li> <li>• Jumlah tahanan memiliki pengaruh negatif dan signifikan</li> <li>• Lag Crime memiliki pengaruh positif dan signifikan : (Variabel Demografi)</li> <li>• Usia dibawah 25 tahun memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan</li> <li>- Regresi II : (variabel demografi) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia dibawah 25 tahun memiliki pengaruh positif dan signifikan : (Variabel Pencegah)</li> </ul> </li> <li>• Jumlah polisi memiliki pengaruh negatif dan</li> </ul>
--	--	---	--	--



				<p>signifikan : ( Variabel Ekonomi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan</li> </ul>
3	<p>Stepen Machin dan Costas Maghir (2004)</p> <p><i>Crime and Economic Incentives</i></p>	<p>Var. Dependen: Tingkat Kejahatan Properti</p> <p>Var. Independen : Tingkat upah riil; penduduk usia 15-24 tahun; panjang rata – rata hukuman; tingkat penghukuman</p>	Menggunakan metode OLS	<p>- OLS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat upah riil memiliki pengaruh negatif dan signifikan</li> <li>• Penduduk usia 15-24 tahun memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan</li> <li>• Tingkat hukuman memiliki pengaruh negatif dan signifikan</li> <li>• Pajang rata – rata penghukuman memiliki pengaruh negatif dan signifikan</li> </ul>
4	<p>Lance Lochner (2007)</p> <p><i>Education and Crime</i></p>	<p>Var. Dependen : Tingkat Kejahatan</p> <p>Var. Independen : Pendidikan</p>	Metode OLS	Secara Empiris, meningkatnya tingkat pendidikan dapat menurunkan tindak kekerasan dan kejahatan properti secara signifikan
5	<p>Ihdal Husnayain (2007)</p> <p>Analisis Ekonomi Kejahatan</p>	<p>Var. Dependen : Kejahatan Properti</p> <p>Var. Independen : Pendapatan; pengangguran; proporsi usia 15-29 tahun; tingkat penyelesaian kasus oleh polisi (PAP): koefisien</p>	Metode Ordered Logit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan</li> <li>- Variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan</li> <li>- Variabel proporsi usia 15-29 tahun memiliki pengaruh positif dan signifikan</li> <li>- Variabel tingkat penyelesaian kasus memiliki</li> </ul>

	Properti di Indonesia Tanun 2005	gini; kekuatan kepolisian		<p>pengaruh positif dan signifikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel kekuatan kepolisian tidak berpengaruh terhadap tingkat kejahatan</li> <li>- Variabel koefisien gini tidak berpengaruh terhadap tingkat kejahatan</li> </ul>
6	<p>Rizki Abinul Hakim (2009)</p> <p>Analisis Determinan Tingkat kejahatan Properti di Jawa Tahun 2007</p>	<p>Var. Dependen : Tingkat Kejahatan Properti</p> <p>Var. Independen : Daerah perkotaan; upah; kemiskinan; pengangguran; usia 15-24 tahun; Janda; jumlah kepolisian</p>	Model Ordered Logit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah perkotaan memiliki pengaruh positif dan signifikan</li> <li>- Variabel upah memiliki pengaruh negatif dan signifikan</li> <li>- Variabel kemiskinan tidak berpengaruh dan tidak signifikan</li> <li>- Variable pria usia 15-24 tahun memiliki hubungan positif dan signifikan</li> <li>- Variabel jumlah kepolisian memiliki hubungan negatif dan signifikan</li> <li>- Variabel keluarga <i>single mother</i> tidak memiliki hubungan dan tidak signifikan</li> </ul>
7	<p>Florentinus Nugroho Hardianto (2009)</p> <p>Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi</p>	<p>Var. Dependen : Jumlah terdakwa kejahatan properti dan jumlah terdakwa keseluruhan</p> <p>Var. Independen : probabilitas jumlah terdakwa yang dipenjara; tingkat upah; pengeluaran pembangunan untuk sektor hukum</p>	Metode OLS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel tingkat upah memiliki pengaruh negatif dan signifikan</li> <li>- Variabel pengeluaran pembangunan untuk sektor hukum memiliki pengaruh positif dan signifikan</li> <li>- Variabel jumlah terdakwa yang dihukum memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan</li> </ul>

	Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi			
8	<p>Neny Risky Ramadani (2012)</p> <p>Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Makassar)</p>	<p>Var. Dependen : Tingkat Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor</p> <p>Var. Independen : Faktor ekonomi (tanggungan keluarga dan pendapatan) ; Faktor lingkungan; Faktor pendidikan; Faktor penegak hukum</p>	<p>Metode kualitatif dan kuantitatif ( dengan menggunakan tabulasi frekuensi)</p>	<p>- Variabel Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggungan keluarga (seperti keluarga sedang sakit, rasa cinta terhadap keluarga) sangat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan</li> <li>• Pendapatan rendah akan mendorong seseorang untuk bertindak kriminal, maka pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kejahatan</li> </ul> <p>- Variabel Pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan. Karena pada penelitian ini banyaknya narapidana tergolong pada pendidikan rendah</p>

	Pada Tahun 2007 – 2011)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Lingkungan mempunyai hubungan positif terhadap tingkat kejahatan</li> <li>- Variabel hukum sangat berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas, artinya bahwa jika penegak hukum terlalu lemah, maka tingkat kejahatan akan meningkat.</li> </ul>
--	----------------------------	--	--	--

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kemampuan seseorang untuk masuk ke aktivitas ilegal atau tindak kriminal sebagian besar disebabkan karena ketersediaan waktu yang berlebih dan ketidakmampuannya untuk masuk ke pasar legal sehingga membuatnya menganggur dan berusaha mendapatkan kepuasan dengan cara ilegal. Hal itu dikarenakan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti pendidikan sangatlah kurang. Tingginya biaya pendidikan yang tidak seimbang dengan rendahnya pendapatan mereka menjadi kendala untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih dibutuhkan di pasar tenaga kerja legal.

Akan tetapi, kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada pendidikan saja. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menyebabkan mereka untuk terus berusaha memenuhi kebutuhannya. Mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi tentu akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pendidikan, kesehatan, dsb. Sedangkan si miskin akan terus menunggu bantuan atau melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakmampuan inilah yang akan memicu si miskin untuk melihat aktivitas ilegal yang mempunyai ekspektasi nilai kepuasan lebih tinggi dibandingkan aktivitas yang legal.

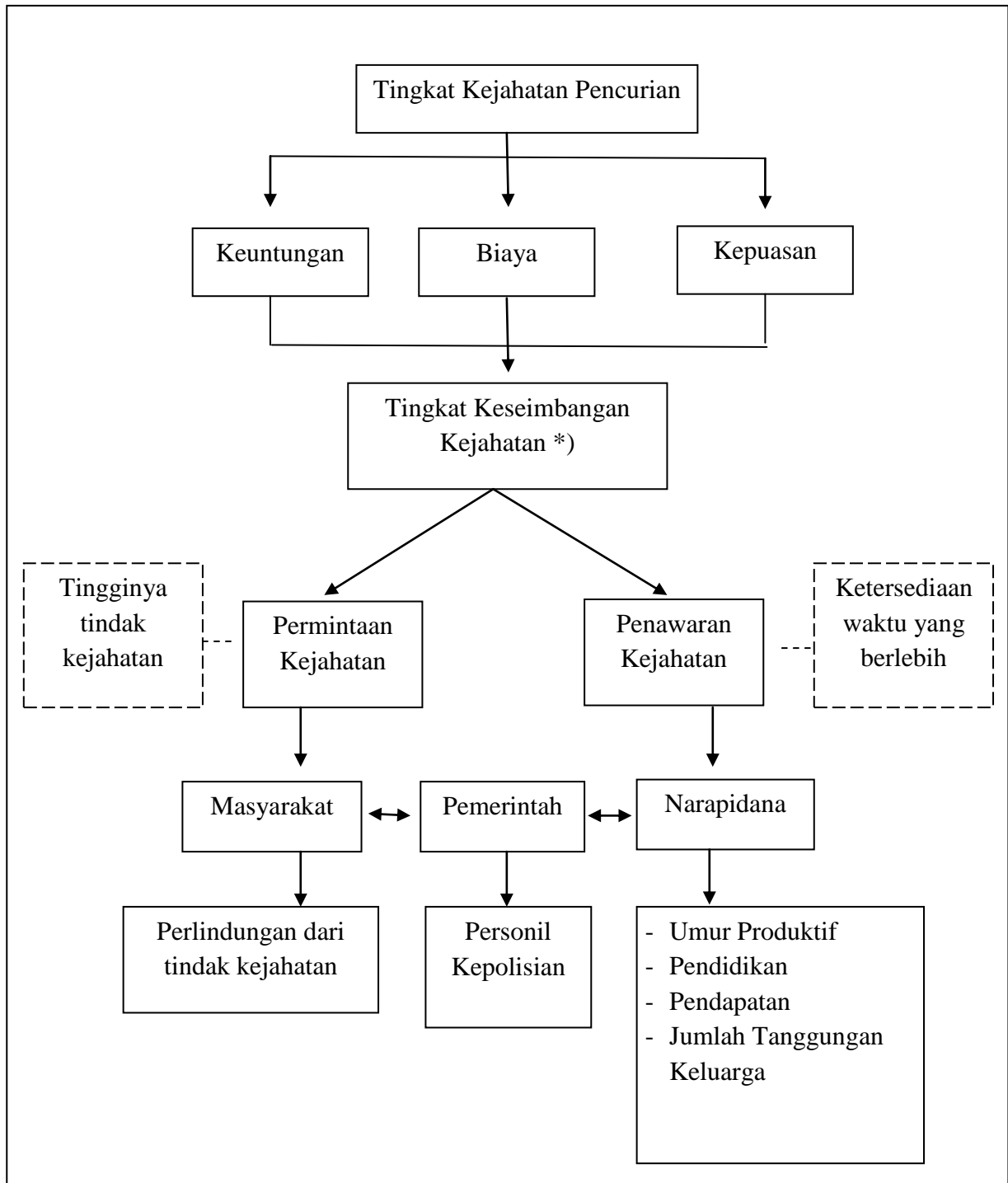
Selain itu, tingginya pertumbuhan penduduk dengan tidak diimbangi penyediaan lapangan pekerjaan juga semakin menambah tingginya tingkat kriminalitas. Hal itu dapat terjadi karena semakin tingginya angka pengangguran tentu akan menambah beban suatu negara atau daerah. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa para penganggur tersebut sebenarnya termasuk dalam penduduk

yang berusia produktif yang seharusnya bisa diandalkan untuk perekonomian kita. Akan tetapi, ketersediaan waktu yang berlebih membuat mereka bingung untuk memilih bekerja di sektor legal dengan upah yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau bekerja di sektor ilegal dengan ekspektasi upah yang lebih tinggi daripada upah di sektor legal.

Semakin meningkatnya tindak kriminalitas maka pemerintah didorong untuk semakin memperbanyak anggarannya guna penyediaan jasa keamanan. Dengan penambahan jumlah personil polisi atau tenaga keamanan lainnya tentu akan menurunkan jumlah kejahatan yang ada karena para pelaku kejahatan harus berpikir dua kali untuk kembali melakukan kejahatan dengan peluang tertangkap yang semakin tinggi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka peneliti menggunakan variabel yang mempengaruhi tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang yaitu variabel umur atau usia 15 – 29 tahun, dimana pada usia tersebut rentan sekali menjadi pelaku kriminal. Variabel pendidikan, dimana rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan dengan mudah berbuat tindakan kejahatan, dikarenakan banyaknya waktu luang yang terbuang dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Variabel pendapatan, dimana pendapatan yang rendah akan mendorong seseorang untuk berbuat jahat atau bertindak jahat untuk bisa menambah penghasilan. Dan variabel tanggungan keluarga, dimana semakin banyaknya tanggungan di dalam sebuah keluarga, rasa cinta terhadap keluarga, seseorang akan berbuat nekat untuk bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Dari uraian diatas, maka dapat diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : \*) Becsi, 1999

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka (Martono, 2011). Hipotesis pada dasarnya berfungsi untuk mengungkapkan masalah. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian maka dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

1. Variabel umur diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang. Semakin banyak penduduk yang berada pada usia produktif, maka tingkat kejahatan akan semakin besar.
2. Variabel pendidikan diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan di Kota Semarang. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang yang ditamatkan, maka semakin tinggi tingkat kejahatan.
3. Variabel pendapatan diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang. Semakin rendah pendapatan seseorang, maka tingkat pencurian akan semakin tinggi.
4. Variabel jumlah tanggungan keluarga diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Kota Semarang. Semakin banyaknya jumlah tanggungan keluarga, maka semakin tinggi pula tingkat kejahatan pencurian.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya bergantung pada nilai variabel lain yang merupakan akibat dari perubahan yang terjadi variabel bebas ( variabel independen ) (Praba, 2012). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kriminalitas kejahatan pencurian di Kota Semarang. Dalam penelitian ini variabel tingkat kejahatan pencurian di log kan sehingga satuan dari variabel ini adalah persen.

Variabel independen adalah variabel yang bersifat mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu (Martono, 2011). Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah umur, tingkat pendidikan, pendapatan, dan jumlah tanggungan keluarga kemudian variabel tersebut di log kan sehingga satuan dari variabel ini adalah persen.

##### **3.1.2 Definisi Operasional variabel**

Definisi operasional dan skala pengukuran dari masing – masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kejahatan

Menyatakan banyaknya seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Variabel ini diukur dari berapa kali responden melakukan tindak kejahatan. Variabel ini telah di log kan sehingga satuannya menjadi persen.

2. Umur

Menyatakan umur responden pada saat di dalam tahanan atau ketika responden sedang menjalani proses hukuman, diukur dalam satuan tahun. Variabel ini telah di log kan sehingga satuannya menjadi persen.

3. Tingkat Pendidikan

Menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk menamatkan pendidikan terakhir, dengan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, Akademi, dan Universitas. Diukur dalam satuan tahun. Variabel ini telah di log kan sehingga satuannya menjadi persen.

4. Pendapatan

Jumlah seluruh penghasilan atau penerimaan yang diperoleh responden baik berupa gaji atau upah maupun pendapatan dari usaha dan pendapatan lainnya selama satu bulan. Diukur dalam satuan rupiah. Variabel ini telah di log kan sehingga satuannya menjadi persen.

5. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah anak dan anggota keluarga lain yang seluruh biaya hidupnya menjadi tanggung jawab responden yang diukur dengan satuan jumlah orang. Variabel ini telah di log kan sehingga satuannya menjadi persen.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti karena dipandang sebagai semesta penelitian, sedangkan sampel adalah subset dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota populasi (Friedman,2006) dalam (Praba, 2012).

Penelitian ini mengambil kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan wawancara yang didapat dari ketua pembina narapidana di LP Kedungpane Kota Semarang, jumlah populasi narapidana yang terkena kasus tindak pencurian sebanyak 95 narapidana.

Dari data tersebut kemudian ditentukan sampel yang akan ditentukan dengan teknik *Snowball sampling* yaitu dengan cara menemukan satu sampel, untuk kemudian dari sampel tersebut dicari (digali) keterangan mengenai keberadaan sampel lain, terus demikian secara berantai. Sebagai contoh, Jika sudah ditemukan satu orang pelaku tindak pencurian, dari orang tersebut digali informasi siapa saja teman lain yang melakukan tindak pencurian. Begitu seterusnya, sampai dirasa cukup untuk memperoleh data yang diperlukan (Amirin,2011). Dalam penelitian ini , jumlah responden yang bersedia untuk diwawancarai dan dimintai keterangan hanya 66 responden. Hal tersebut dikarenakan banyak narapidana yang takut untuk diwawancarai.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara melalui kuesioner yang telah disiapkan kepada responden narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan atau LP Kedungpane Kota Semarang. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data umur, tingkat pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan keluargadan tingkat kejahatan pencurian yang diukur dengan berapa kali responden melakukan tindak kejahatan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan langsung dari sumbernya ,melainkan dari instansi terkait. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data BPS, Polrestabes Semarang, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, persentase siswa yang terdaftar pada sekolah menengah, tingkat kejahatan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kasus, tingkat penyelesaian kasus tindak kejahatan, Upah Minimum Kota Semarang, jumlah polisi perkapita, tingkat penahanan, selisih terjadinya kriminalitas tiap tahun, dan persentase penduduk usia 25 – 30 tahun selama 3 tahun terakhir di Kota Semarang.

## 3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi secara langsung di lapangan

dengan metode wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dengan metode pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara si penanya dengan responden dengan menyikapi serangkaian daftar pertanyaan (kuesioner) mendetail dengan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses interview tersebut harus mengikuti urutan dan daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diharapkan memperoleh data atau informasi responden sesuai dengan tema yang dibahas.

2. Metode Penelitian Studi Pustaka

Cara pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif melalui berbagai sumber seperti jurnal, buku ilmiah, penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya serta informasi tertulis yang berasal dari instansi terkait maupun internet yang berhubungan dengan topik penelitian.

### **3.5 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dari perubahan suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut (Kuncoro, 2004) dalam (Kurniawan, 2013) kelebihan dari metode analisis regresi linear berganda menurut Tabachnick dan Fidel adalah sebagai berikut:

1. Dapat meminimalkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen.
2. Dapat mengoptimalkan korelasi antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada.

Penelitian ini menggunakan model *double – log* yang ditulis sebagai berikut:

$$\text{LogY} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogX}_1 + \beta_2 \text{LogX}_2 + \beta_3 \text{LogX}_3 + \beta_4 \text{LogX}_4 + u \dots\dots(3.1)$$

Dimana :

- Y = Tingkat kejahatan pencurian, dalam satuan persen
- X<sub>1</sub> = Umur, dalam satuan persen
- X<sub>2</sub> = Tingkat pendidikan, dalam satuan persen
- X<sub>3</sub> = Pendapatan, dalam satuan persen
- X<sub>4</sub> = Tanggungan keluarga, dalam satuan persen
- β<sub>0</sub>, β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub>, β<sub>4</sub> = Koefisien dari masing – masing variabel
- u<sub>i</sub> = Disturbance error

Karena data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat perbedaan satuan, data untuk variabel pencurian dalam satuan kali, variabel umur dalam satuan tahun, variabel pendidikan dalam satuan tahun, variabel pendapatan dalam satuan rupiah dan jumlah tanggungan keluarga dalam satuan jiwa atau orang. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti memodifikasi data, yaitu dengan cara melogaritmakan semua variabel sehingga satuannya menjadi persen. Jika satuannya tidak disamakan, maka terjadi perbedaan nilai yang terlalu ekstrim (ada nilai yang terlalu tinggi dan ada nilai yang terlalu rendah), dimungkinkan data tidak berdistribusi secara normal (groups.yahoo.com)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis regresi berganda tersebut, perlu dilakukan pengujian, baik uji asumsi klasik maupun secara statistik.

### 3.6 Pendeteksian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan pendeteksian penyimpangan asumsi klasik. Pendeteksian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari penyimpangan asumsi klasik ataukah tidak.

#### 3.6.1 Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 2009). Jika asumsi dari model klasik terpenuhi, estimator OLS dari estimator regresi adalah estimator terbaik, linear, dan tidak bias (BLUE).

Adanya multikolinearitas atau korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat dideteksi dengan beberapa langkah di bawah ini:

- a. Nilai  $R^2$  tinggi, tetapi hanya sedikit nilai  $t$  ratio yang signifikan. Jika nilai  $R^2$  tinggi di atas 0,80, maka uji  $F$  pada sebagian besar kasus akan menolak hipotesis yang menyatakan bahwa koefisien slope parsial secara simultan sama dengan nol, tetapi uji  $t$  individual menunjukkan sangat sedikit koefisien slope parsial yang secara statistik berbeda dengan nol.
- b. Adanya *pair-wise correlation* yang tinggi antar variabel independen. Jika *pairwise correlation* antar dua variabel independen tinggi, katakanlah 0,80, maka multikolinearitas merupakan masalah serius. Hal ini dapat dideteksi dengan melihat matriks korelasi antar variabel independen.

- c. Melihat korelasi parsial. Pada regresi variabel X2, X3 dan X4 terhadap Y, jika nilai  $R^2_{1.234}$  sangat tinggi, tetapi  $r^2_{12.34}$ ,  $r^2_{13.24}$ , dan  $r^2_{14.23}$  relatif rendah nilainya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2, X3, dan X4 saling berkorelasi tinggi dan salah satu dari variabel ini *superfluous*.
- d. *Auxiliary regression*. Multikolinearitas timbul karena satu atau lebih variabel independen berkorelasi secara linear dengan variabel lainnya. Salah satu cara menentukan variabel X mana yang berhubungan dengan variabel X lainnya adalah dengan meregres setiap  $X_i$  terhadap variabel X sisanya dan menghitung nilai  $R^2$ . Hubungan antara F dan  $R^2$  dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut :

$$R_i = \frac{R^2_{x1.x2.x3...xk/(k-2)}}{(1-R^2_{x1.x2.x3...xk})/(n-k+1)} \dots\dots\dots (3.2)$$

Variabel mengikuti distribusi F dengan derajat bebas (df)  $k-2$  dan  $n-k+1$ ,  $n$  adalah ukuran sampel,  $k$  jumlah variabel independen termasuk intersep, dan  $R^2_{x1.x2.x3...xk}$ . Adalah koefisien determinasi dalam regresi  $X_i$  terhadap variabel X lainnya. Jika nilai F hitung > nilai F tabel, maka  $X_i$  berkorelasi tinggi dengan variabel X's lainnya. Tanpa menguji semua nilai  $R^2$  auxiliary, kita dapat menggunakan kriteria kasar *Klien's rule of thumb* yang menyatakan bahwa multikolinearitas menjadi bermasalah jika  $R^2$  yang diperoleh dari *auxiliary regression* lebih tinggi daripada  $R^2$  keseluruhan yang diperoleh dari meregres semua variabel X's terhadap Y.

- e. *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen



manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresikan terhadap variabel independen lainnya. Jadi *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah  $Tolerance < 0.10$  atau sama dengan  $VIF > 10$ .

### 3.6.2 Deteksi Heterokedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Seperti pada multikolinearitas, tidak ada peraturan baku untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas, akan tetapi situasi ini tidak terelakkan karena  $\sigma^2$  hanya dapat diketahui jika memiliki variabel dependen yang berhubungan dengan variabel independen. Heteroskedastisitas tidak merusak *property* dari estimasi *ordinasry least square* (OLS) yaitu tetap tidak biased (*unbiased*) dan konsisten estimator, tetapi estimator ini tidak lagi memiliki minimum *variance* dan efisien sehingga tidak lagi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi digunakan metode glejser. Metode Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual ( $AbsU_i$ ) terhadap variabel independen lainnya dengan persamaan regresi sebagai berikut: (Ghozali, 2009).

$$|U_i| = \alpha + \beta X_i + u_i \dots\dots\dots (3.3)$$

Jika  $\beta$  signifikan, maka mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas dalam model.

### 3.6.3 Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Maka regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan pola distribusi normal.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya, menunjukkan pola distribusi tidak normal.

Uji menggunakan Kolmogorov – Smirnov untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang terjadi pada deteksi normalitas dengan menggunakan grafik.

Konsep dasar dari deteksi normalitas Kolmogorov – Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan di uji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov – Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah

0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansinya di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov – Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Uji Kolmogorov – Smirnov dilakukan dengan hipotesis:

HO : Residual terdistribusi normal

HA : Residual tidak terdistribusi normal

#### 3.6.4 Deteksi Autokorelasi

Deteksi autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali,2009).

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan Durbin-Watson test. Durbin-Watson test dapat ditulis sebagai berikut :

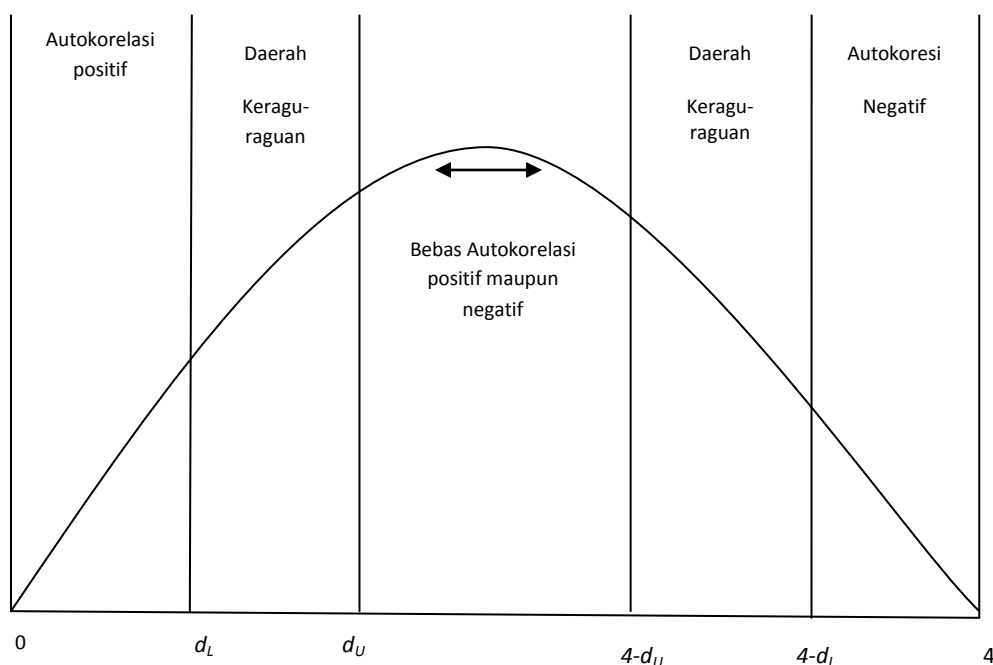
$$d = \frac{\sum_{t=2}^{t=N} (e_t - (e_{t-1}))^2}{\sum_{t=2}^{t=N} e_t^2} \dots\dots\dots (3.4)$$

Dimana :

d = koefisien Durbin-Watson  
t = t hitung  
N = sampel  
e = residual

nilai  $d$  yang diperoleh dibandingkan dengan  $d_L$  dan  $d_U$  pada tabel, jika  $d < d_L$  atau  $d > 4 - d_L$  berarti terdapat autokorelasi, bila nilai  $d$  terletak antara  $4 - d_U < d < 4 - d_L$  atau  $d_L < d < d_U$  berarti tidak dapat dipastikan adanya autokorelasi, bilamana  $d_U < d < 4 - d_U$  berarti bebas dari autokorelasi positif maupun negatif.

**Gambar 3.1**  
**Uji Durbin-Watson**



Sumber : Gujarati, 2003

### 3.7 Pengujian Hipotesis

#### 3.7.1 Uji Goodnes Of Fit (Koefisien Determinasi/ $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen

sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing – masing pengamat, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi.

Kadangkala peneliti ingin memaksimumkan nilai  $R^2$  sehingga mencari model yang menghasilkan nilai  $R^2$  tinggi. Hal ini jika dilakukan berbahaya karena tujuan analisis regresi bukan semata – mata ingin mendapatkan nilai  $R^2$  tinggi, tetapi mencari nilai estimasi koefisien regresi dan menarik inferensi statistik. Dalam kenyataan empiris biasanya ditemukan regresi dengan nilai  $R^2$  tinggi, tetapi nilai koefisien regresi tidak ada yang signifikan atau memiliki tanda koefisien yang berlawanan dari yang diharapkan secara teori. Jadi sebaiknya peneliti lebih melihat logika atau penjelasan teoritis pengaruh variabel *explanatory* terhadap variabel dependen. Jika dalam proses mendapatkan nilai  $R^2$  tinggi adalah baik, tetapi jika  $R^2$  rendah tidak berarti model regresi jelek (Ghozali, 2009).

Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi ( $R^2$ ) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan

sebaran data,  $R^2$  menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas.

### 3.7.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan.

Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

#### 1) Membuat formulasi Hipotesis

##### a. Variabel umur.

- $H_o : \beta_1 = 0$ , artinya variabel umur tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian.
- $H_a : \beta_1 > 0$ , artinya variabel umur memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian.

##### b. Variabel tingkat pendidikan

- $H_o : \beta_2 = 0$ , artinya variabel tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian.
- $H_a : \beta_2 < 0$ , artinya variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian.

##### c. Variabel pendapatan.

- $H_o : \beta_3 = 0$ , artinya variabel pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian.

- $H_a : \beta_3 < 0$ , artinya variabel pendapatan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian.

d. Variabel Jumlah Tanggungan Keluarga.

- $H_o : \beta_4 = 0$ , artinya variabel jumlah tanggungan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian.
- $H_a : \beta_4 < 0$ , artinya variabel jumlah tanggungan keluarga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian.

2) Kriteria Pengujian Hipotesis

- Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai t-hitung dengan t-tabel untuk nilai positif menggunakan kriteria sebagai berikut :
  1. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_o$  ditolak artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.
  2. Ditolak  $H_o$  jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima artinya suatu variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.
- Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai t-hitung dengan t-tabel untuk nilai negatif menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Diterima  $H_0$  jika  $-t_{\text{tabel}} > -t_{\text{hitung}}$  maka  $H_a$  ditolak artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat
2. Ditolak  $H_0$  jika  $-t_{\text{tabel}} < -t_{\text{hitung}}$  maka  $H_a$  diterima artinya suatu variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

### 3.7.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian secara simultan (uji F) dimaksudkan untuk melihat apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen dependen atau terikat (Ghozali, Imam, 2009.).

Nilai F hitung dapat diperoleh dengan menggunakan formula, sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 (k-2)}{(1-R^2)(n-k+1)} \dots \dots \dots (3.5)$$

dimana :

$R^2$  = Koefisien determinasi

n = Jumlah observasi

k = Jumlah variabel

F = Nilai F yang dihitung

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots B_k = 0$ , artinya variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat.



$H_A : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k \neq 0$ , artinya variabel-variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan :

- Apabila  $t_{\text{Hitung}} > t_{\text{Tabel}}$  pada tingkat signifikansi 5 % ( $\alpha = 0.05$ ) maka  $H_0$  ditolak atau  $H_A$  diterima, yang berarti variabel bebas secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- Apabila  $t_{\text{Hitung}} < t_{\text{Tabel}}$  pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0.05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_A$  ditolak, yang berarti variabel bebas secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.